



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



LKJIP DINAS KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 disusun sebagai bentuk kepatuhan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2024, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan, serta menyajikan perkembangan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, LKJIP memuat ikhtisar kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang meliputi nilai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi kinerja.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. LKJIP ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Rencana Strategis, khususnya terkait pencapaian kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), semua indikator mencapai kategori sangat berhasil dengan nilai capaian kinerja > 100%. Adapun indikator yang dimaksud yaitu : (1). Pencapaian Skor Pola Pangan (PPH), (2). Ketersediaan Energi Per Kapita, Ketersediaan Energi Per Kapita, Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan, dan Persentase Pengawasan Keamanan Pangan.

Program ini memberikan penjelasan terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perhatian serius untuk pencapaian target pembangunan ketahanan pangan ke depan. Tentu saja kita semua berharap, kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang akan datang dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang dan

potensi yang optimal, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Besar harapan kami Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (feedback) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan pembangunan ketahanan pangan ke depan.

Makassar, 3 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19820930 200012 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF



Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Rencana Strategis, khususnya terkait pencapaian kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), semua indikator mencapai kategori sangat berhasil dengan nilai capaian kinerja > 100%. Adapun indikator yang dimaksud yaitu : (1). Pencapaian Skor Pola Pangan (PPH), (2). Ketersediaan Energi Per Kapita, Ketersediaan Energi Per Kapita, Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan, dan Persentase Pengawasan Keamanan Pangan.

Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan strategis tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.24,555,363,432,- kemudian terjadi penurunan pagu saat Perubahan sebesar Rp. 15,890,712,670,00 yang dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp.13,417,580,867,00 atau 84,44 % dari alokasi anggaran Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah	7
1.4. Landasan Hukum	8
1.5. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	12
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Realisasi Anggaran	58
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
3.4. Catatan Atas Penilaian LHE Kemenpan RB	64
BAB IV. PENUTUP	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Menurut Status Kepegawaian	4
Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan	5
Tabel 1.3. Keadaan Pegawai menurut Klasifikasi Golongan	5
Tabel 1.4. Keadaan Pegawai menurut Klasifikasi Eselonering	6
Tabel 1.5. Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin	6
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	11
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024	13
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024	14
Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	15
Tabel 2.5. Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	17
Tabel 3.1. Pengkategorian Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	22
Tabel 3.3. Capaian Indikator Ketersediaan Pangan Utama selama 5 (lima) tahun	24
Tabel 3.4. Perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan Kelompok Pangan	26
Tabel 3.5. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	27
Tabel 3.9. Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan	31
Tabel 3.10. Formulasi NBM online	34
Tabel 3.11. Jadwal Pelaksanaan kegiatan GERMAS	45
Tabel 3.12 Perbandingan capaian kinerja	48
Tabel 3.13. Tingkat kemajuan Capaian sasaran Strategis	49
Tabel 3.14. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten /Kota lain	50
Tabel 3.15. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	51
Tabel 3.16. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	54
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024	58
Tabel 3.18. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	59
Tabel 3.19. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan	3
Gambar 2. Pemberdayaan lorong wisata	36
Gambar 3. Kegiatan pengawasan keamanan pangan	44
Gambar 4. Kegiatan germas	46
Gambar 5. Dokumentasi registrasi keamanan pangan tahun 2024	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kelurahan yang terindikasi rawan pangan	65
Lampiran 2. Hasil peta komposit Tahun 2024 yang menggambarkan gabungan Dari ke – 5 indikator	67
Lampiran 3. Hasil uji rapid test kit Keamanan dan mutu Pangan segar Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar di pasar Moderen dan tradisional Kota Makassar Tahun 2024	68
Lampiran 4. Lokasi, waktu dan tempat pelaksanaan pembinaan pelaku Usaha Penerima nomor registrasi Tahun 2024	94
Lampiran 5. Penerbitan nomor registrasi PDUK Kota Makassar Tahun 2024	95
Lampiran 6. SK Tim SAKIP Perangkat Daerah	102
Lampiran 7. Matriks RENSTRA	106
Lampiran 8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama	111
Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar, yaitu: (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

Pencapaian target kinerja tersebut kemudian dituangkan pada rumusan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang diharapkan memberikan dorongan dan stimulus yang besar untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar telah menetapkan 7 (tujuh) kegiatan penunjang dan 7 (tujuh) kegiatan strategis diantaranya (1).Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (2) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, (3). Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, (4). Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, (5). Penyusunan Peta

Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, (6). Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan (7). Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran – sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar (PERWALI) No. 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan bahwa Dinas ketahanan Pangan terdiri atas 1 (satu) Sekretariat yang dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian, (1). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, (2) Sub Bagian Keuangan dan (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 4 (empat) Bidang, (1). Bidang Produksi dan Ketersediaan Pangan, (2). Bidang Kerawanan, Distribusi dan Cadangan Pangan, (3). Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan (4). Bidang Keamanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar mempunyai struktur/perangkat organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Keamanan Pangan
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
5. Kepala Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan
6. Kepala Bidang Kerawanan, Distribusi dan Cadangan Pangan
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
9. Kepala Sub Bagian Keuangan

1.2. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar



Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 92 tahun 2016 memiliki struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, koordinasi bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, keamanan, distribusi, dan penyuluhan pertanian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar adalah :

1. Penyediaan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, keamanan, dan distribusi
2. Penyiapan bahan bimbingan peningkatan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, keamanan, dan distribusi
3. Penyiapan bahan penyusunan program pemantauan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, keamanan dan distribusi.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai bagian integrasi dari pemerintahan Kota Makassar, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar mendukung pencapaian Visi Walikota Makassar periode 2021-2026 adalah :

**“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang
“Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kuat untuk semua”**

Dimana tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam Misi 1 (satu) yaitu: “Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi Korupsi” dengan Program yaitu 10.000 Skill Training Gratis. Kemudian, Misi 2 (dua) yaitu : “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua” dengan Program yaitu Gerakan Masyarakat Perkuatan Imunitas kesehatan dan Ekonomi. Dan terakhir Misi 3 (tiga) yaitu: “Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju kota Nyaman kelas dunia ‘Sombere dan Smart’ City untuk Semua”, dengan Program Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5.000 Lorong Wisata.

Sumber Daya Manusia Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar didukung oleh sumber daya aparatur yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang. Keragaan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar hingga 31 Desember Tahun 2024 berjumlah 83 orang, PNS sejumlah 42 orang dan Tenaga dengan Kontrak Kerja yang disebut dengan istilah Laskar Pelangi sejumlah 41 orang.

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	LK	PR	Jumlah (Orang)
1.	Pejabat Struktural	2	5	7
2.	PNS Fungsional Tertentu	2	5	7
3.	PNS Fungsional Umum	4	12	16
4.	PPPK	5	7	12
5.	Tenaga Kontrak	16	25	41
	Jumlah	29	54	83

Sumber : DKP Kota Makassar , 2024

Berdasarkan tabel 1, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) struktural ada 7 orang yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan, 1 orang Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dan 35 orang sebagai staf serta 41 orang staf Laskar Pelangi.

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS Struktural		PNS Fungsional		PPPK		Tenaga Kontrak		Jumlah (Orang)	Persentase
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr		
1.	Strata 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1,20
2.	Strata 2	1	11	-	3	-	-	-	-	15	18,07
3.	D4/Strata 1	1	4	5	4	5	7	4	14	44	53,01
4.	D 3	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2,40
5.	SLTA	-	-	-	-	-	-	12	8	20	24,09
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1,20
	Jumlah	3	15	5	7	5	7	16	25	83	100

Sumber : DKP Kota Makassar, 2024

Berdasarkan pada Tabel.2 terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dominan pendidikan strata 1 yaitu 53,01%. Sedangkan tingkat pendidikan pada strata 3 yaitu 1,20%, strata 2 yaitu 18,07%, D3 yaitu 2,40%, SLTA yaitu 24,09% dan SLTP yaitu 1,20%.

Tabel 1.3. Keadaan Pegawai menurut Klasifikasi Golongan

No.	Golongan	LK	PR	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	IV	3	7	10	34,48%
2.	III	5	14	19	65,51%
3.	II	-	-	-	-
4.	I	-	-	-	-
	Jumlah	8	21	29	100,00

Sumber : DKP Kota Makassar, 2024

Berdasarkan pada Tabel. 3 terlihat bahwa keadaan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar menurut golongan adalah terbanyak pada pegawai dengan golongan III yaitu sebesar 65,51%.

Tabel 1.4. Keadaan Pegawai menurut Klasifikasi Eselonering

No.	Eselonering	Terisi (Orang)	Persentase (%)
1.	II	1	14,28
2.	III	4	57,14
2.	IV	2	28,57
Jumlah		7	100,00

Sumber : DKP Kota Makassar, 2024

Berdasarkan pada Tabel. 4 terlihat bahwa eselon III berjumlah paling banyak dan menempati urutan pertama sebesar 57,14% dibanding dengan eselon IV dan II.

Tabel 1.5. Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Terisi (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki		
	- PNS	8	9,63
	- PPPK	5	6,02
	- Tenaga Kontrak	16	19,27
2.	Perempuan		
	- PNS	22	26,50
	- PPPK	7	8,43
	- Tenaga kontrak	25	30,12
Jumlah		83	100.00

Sumber : DKP Kota Makassar, 2024

Berdasarkan Tabel.1.5 terlihat bahwa keadaan pegawai menurut jenis kelamin adalah jenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding dengan pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 73,33%.

1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar di masa mendatang.

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Belum optimalnya pemenuhan pangan dan kecukupan gizi.
3. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap distribusi pangan yang masuk ke dalam kota Makassar.
4. Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan di Kota Makassar
5. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di Kota Makassar.

Isu-isu strategis di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota , yaitu : Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat miskin belum maksimal, tingginya temuan pelanggaran standar keamanan pangan, belum tersedianya sarana prasarana keamanan pangan dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar telah menyiapkan 4 (empat) program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa :
 - Ketersediaan lumbung pangan di perkotaan yang tidak tersedia ;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap kontribusi lumbung pangan sektoral perkotaan dari pihak swasta.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa:
 - Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pola konsumsi B2SA, diatasi melalui kegiatan Sosialisasi pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - Ketersediaan bahan pangan di Kota Makassar sangat tergantung pada Distribusi bahan pangan dari luar daerah maupun impor, sehingga diperlukan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang berwenang, diatasi melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota
 - Perlunya informasi yang *real* dan *up to date* terkait kondisi harga, stok dan

pasokan harga pangan secara terbuka untuk masyarakat diatasi melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pangan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya sarana dan prasarana serta koordinasi antara instansi terkait belum optimal diatasi melalui kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Program Keamanan Pangan
 - Adanya temuan pelanggaran standar keamanan pangan, belum tersedianya sarana prasarana keamanan pangan dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman, diatasi melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal Di Tetapkan : 23 september 2024 ;
6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun

Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2023.

8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111).
9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 94).
10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 25);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94) Ditetapkan Tanggal 29 Desember 2023;
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal Di Tetapkan : 24 September 2024 ;
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 (Berita Daerah tahun 2023 Nomor 25).

1.5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

1. Visi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022 - 2026 Visi “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere & Smart City dengan Immunitas Kuat untuk Semua”.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026 tersebut diatas dijabarkan Misi sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai bagian integrasi dari pemerintahan Kota Makassar, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar mendukung pencapaian Visi Walikota Makassar periode 2022-2026 adalah :

**“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang
“Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kuat untuk semua”**

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Makassar Tahun 2022-2026 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar akan mendukung terlaksanya Visi dan Misi sebagai berikut;

- a) Misi 1 (satu) yaitu: “Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi Korupsi” dengan Program yaitu 10.000 Skill Training Gratis. Kemudian,
- b) Misi 2 (dua) yaitu : “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan

yang kuat untuk semua” dengan Program yaitu Gerakan Masyarakat Perkuatan Imunitas kesehatan dan Ekonomi. Dan terakhir

- c) Misi 3 (tiga) yaitu: “Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju kota Nyaman kelas dunia ‘Sombere dan Smart’ City untuk Semua”, dengan Program Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5.000 Lorong Wisata.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Makassar Tahun 2022-2026 sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	A
1.1		Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	90	90	90	90	90
1.2			Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90	90	90	90	90
1.3			Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100	100	100	100	100

2	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.		Indeks Ketahanan Pangan	> 70,64	> 70,64	> 70,64	> 70,64	> 70,64
2.1		Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.	Ketersediaan Pangan Utama	90 %	91%	92%	93%	94%
2.2.			Skor Pola Pangan Harapan	80	82	85	88	90
2.3			Ketersediaan Energi Perkapita	2600	2600	2700	2700	2700
2.4			Ketersediaan Protein Perkapita	126	126	127	128	129
2.5			Jumlah Lorong wisata dan Lorong garden	500	500	500	500	500
2.6			Jumlah Training Skill Gratis	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang
2.7			Persentase Penanganan Daerah Rawan	23,52 %	17,64%	11,76%	11,76%	5,88%
2.8			Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	90%	92%	94%	96%	98%

Sumber Data : Renstra DKP Kota Makassar 2022-2026

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2021 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka tertentu (time bound), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB
1.1	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	90
1.2		Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	90
1.3		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%	100
2	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	> 70,64
2.1	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.	Ketersediaan Pangan Utama	%	92%
2.2.		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85
2.3		Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/Kapita/Tahun	2700
2.4		Ketersediaan Protein Perkapita	gr/Kapita/Tahun	127
2.5		Jumlah Lorong wisata dan Lorong garden	Lorong	300
2.6		Jumlah Training Skill Gratis	Orang	0
2.7		Persentase Penanganan Daerah Rawan	%	11,76 %
2.8		Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100 %

Sumber : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, telah ditetapkan 4 program, 12 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dan secara garis besar tertuang pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Pada tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB
1.1	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	90
1.2		Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	90
1.3		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%	100
2	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	> 70,64
2.1	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.	Ketersediaan Pangan Utama	%	92%
2.2.		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85
2.3		Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/Kapita/Tahun	2700
2.4		Ketersediaan Protein Perkapita	gr/Kapita/Tahun	127
2.5		Jumlah Lorong wisata dan Lorong garden	Lorong	300
2.6		Jumlah Training Skill Gratis	Orang	-
2.7		Persentase Penanganan Daerah Rawan	%	11,76%
2.8		Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Pada perjanjian kinerja tahun 2024 terdapat pengurangan indikator perjanjian kinerja, yaitu Jumlah Lorong Wisata dan Lorong Garden sebanyak 300 lorong dan penghapusan Jumlah skill training gratis, dimana pada Penyusunan Perubahan Anggaran terdapat rasionalisasi target Jumlah training skill menjadi 0 orang, Hal ini dikarenakan pemenuhan target startegis untuk capaian training skill telah terpenuhi

pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk Tahun 2024. Hal ini dikarenakan program tersebut merupakan Program Prioritas Walikota Makassar.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan :

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

NO KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN POKOK (Rp)
2.09.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90	7,438,787,270
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90	
	a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	11 Dokumen	163.788.500
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya pelaksanaan administrasi keuangan	100 %	5.928.590.370
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	519.000.000
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase . Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	793.259.500
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	164.096.000
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	389.052.900

	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	164.096.000
2.09.0 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah lokasi peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan		48.000.000
	a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	1 Unit	48.000.000
2.09.0 3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Lorong garden dan Lorong wisata	300 lorong	7.611.265.700
		Jumlah training skill	0 orang	
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	2700 dan 127	
		Skor pola pangan harapan	82	
	a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan ketersediaan energi dan protein serta stok, pasokan dan harga pangan	1 Dokumen	455.817.500
	b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Cadangan pangan pemerintah	20 ton	324.400.800
	c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah lokasi Analisa ratio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan	1 Kota Makassar	6.831.047.400
2.09.0 4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	17,64 %	354.833.000
	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah data dan informasi tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan	1 Dokumen	138.699.000
	2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan daerah rawan pangan	1 Laporan	216.134.000

2.09.0 5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	437.826.700
	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan pangan segar asal tumbuhan yang aman dan bermutu	1 Laporan	437.826.700

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran dalam efisiensi anggaran dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

NO KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.09.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90	7,438,787,270
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90	
	a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	11 Dokumen	163.788.500
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya pelaksanaan administrasi keuangan	100 %	5.928.590.370
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	519.000.000
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase . Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	793.259.500
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	164.096.000

	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	389.052.900
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	164.096.000
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah lokasi peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan		48.000.000
	a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	1 Unit	48.000.000
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Lorong garden dan Lorong wisata	300 lorong	7.611.265.700
		Jumlah training skill	0 orang	
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	2700 dan 127	
		Skor pola pangan harapan	82	
	a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan ketersediaan energi dan protein serta stok, pasokan dan harga pangan	1 Dokumen	455.817.500
	b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Cadangan pangan pemerintah	20 ton	324.400.800
	c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah lokasi Analisa ratio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan	1 Kota Makassar	6.831.047.400
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	11,76 %	354.833.000
	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah data dan informasi tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan	1 Dokumen	138.699.000
	2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan daerah rawan pangan	1 Laporan	216.134.000

2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	437.826.700
	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan pangan segar asal tumbuhan yang aman dan bermutu	1 Laporan	437.826.700

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

Total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh program dalam tabel ini mencapai Rp15.890.712.670. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah hingga peningkatan ketahanan dan keamanan pangan di masyarakat. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas ASN, optimalisasi pengelolaan keuangan, diversifikasi pangan, serta penanganan daerah rawan pangan. Dengan adanya program ini, diharapkan kinerja pemerintah daerah semakin efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2022-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kota Makassar juga melakukan reviu

terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB (76,80)	100%	Sangat Berhasil	LHE Inspektorat
1.1	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	90 %	98,97 %	109,96	Sangat Berhasil	Sekretariat DKP
1.2		Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	93,6 %	93,6	Sangat Berhasil	Sekretariat DKP
1.3		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 %	98,8 %	109,77	Sangat Berhasil	Sekretariat DKP
2	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan	> 70,64	87,95	100%	Sangat Berhasil	IKP DKP Sulsel
2.1	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.	Ketersediaan Pangan Utama	92%	138,80	150,8	Sangat Berhasil	DKP
		Skor Pola Pangan Harapan	85	89,73	105,56	Sangat Berhasil	DKP
		Ketersediaan Energi Perkapita	2700	2.812	104,15	Sangat Berhasil	DKP
		Ketersediaan Protein Perkapita	127	88,21	69,46	Kurang Berhasil	DKP
		Jumlah Lorong wisata dan Lorong garden	300	283	94,33	Sangat Berhasil	DKP
		Jumlah Training Skill Gratis	-	-	-	Sangat Berhasil	DKP
		Persentase Penanganan Daerah Rawan	11,76%	11,76	100	Sangat Berhasil	DKP
		Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	94	100	106,38	Sangat Berhasil	DKP

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2024

Capaian tujuan indikator utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, DKP berhasil mendapatkan nilai SAKIP 76,80 (BB) dengan capaian 100 %. Hal ini didukung oleh kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan komitmen bersama dalam pencapaian tujuan peningkatan akuntabilitas.
2. Meningkatkan ketahanan pangan di Masyarakat dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan dengan realisasi 87,95 dari target > 70,64 dengan capaian 100% . Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk system ketahanan pangan. Tiga aspek indikator ketahanan pangan yang digunakan dalam penyusunan IKP, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota.
Adapun satu-satunya indikator yang dianggap kurang berhasil dikarenakan target yang melampaui jauh dari standar WNPG sebesar 63 gr/kapita/hari, jadi secara pencapaian nasional, capaian indikator sudah dianggap sangat berhasil karena skor berada pada 88,21 gr/kapita/hari.

INDIKATOR RENCANA STRATEGIS I

Tabel 3.3 Capaian Indikator Ketersediaan Pangan Utama selama 5 (lima) tahun

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata jumlah Ketersediaan pangan Utama pertahun (Kg)	190.305.000	172.990.810	1.265.500	1.877.230	2.019.440
2.	Jumlah penduduk	1.545.373	1.423.877	1.427.609	1.436.626	1.454.960
3.	Ketersediaan pangan utama ($1 / 2 \times 100$)	12.314,50	12.149,28	88,65	130,67	138,80

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Anggaran pokok untuk program ini yaitu Rp. 52.000.000,-, dan pada saat penyusunan Perubahan 2024, menjadi Rp. 48.000.000,- (atau berkurang sebesar Rp 4.000.000,-). Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran pada Program ini yaitu Rp 38,950,920,- atau 81,15 %. Sedangkan untuk realisasi Fisik sebesar 90,43 %.

Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Rata-rata jumlah Ketersediaan pangan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
---------------------------	---

=	$\frac{2.019.440}{1.454.960} \times 100\%$	=	138,80 %
---	--	---	----------

Ketersediaan pangan utama selama kurun waktu 3 tahun (Tahun 2017-2019) mengalami peningkatan, namun di Tahun 2019-2021 ketersediaan pangan utama cenderung mengalami penurunan. Menurunnya ketersediaan pangan utama pada Tahun 2019-2021, merupakan dampak dari adanya wabah virus covid-19 dan adanya penerapan PPKM menyebabkan supply distribusi pangan utama terbatas.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (Tahun 2022-2024) ketersediaan pangan cenderung mengalami peningkatan karena produksi beras cenderung mengalami peningkatan. Tabel diatas untuk jumlah penduduk, data tersebut bersumber dari data BPS Kota Makassar, untuk jumlah penduduk Tahun 2022 ke Tahun 2024 mengalami peningkatan. Ketersediaan pangan utama dari Tahun 2022 ke Tahun 2024 juga mengalami peningkatan, peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan data produksi pangan utama , yaitu komoditi beras. Data produksi beras diperoleh dari Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) serta data dari BPS Kota Makassar

- **Faktor Penghambat** : Ketersediaan anggaran untuk memenuhi unit pendukung kemandirian pangan
- **Faktor Pendorong**
- Ketersediaan pangan utama Tahun 2024 mengalami peningkatan, peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan data produksi pangan utama , yaitu komoditi beras
- Dukungan data pelaku usaha sumber ketersediaan pangan utama di Kota Makassar dan dukungan sumber daya
- **Tindak Lanjut**
- Perampungan laporan pelaksanaan kegiatan

INDIKATOR RENCANA STRATEGIS II

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tahun	Target	Realisasi
2022	80	83,9
2023	82	85,20
2024	85	89,73
(105,56%) Sangat Berhasil		

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa.

Dalam pelaksanaannya Skor PPH dilaksanakan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner pada responden pada 15 kecamatan berdasarkan karakteristik wilayahnya, yaitu kecamatan yang mewakili wilayah industri, pertanian, dan perikanan.

Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan menargetkan sebesar 85 Skor PPH dan terealisasi sebesar 89.73 atau dengan capaian 105.56 %. Hasil di atas didapatkan berdasarkan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner pada responden berdasarkan karakteristik wilayahnya, yaitu kecamatan yang mewakili wilayah pertanian, perikanan dan wilayah lainnya. Perhitungan PPH berdasarkan Data Susenas

Tercapainya skor pola pangan harapan ini tidak terlepas dari mulai baiknya pola konsumsi pangan masyarakat Kota Makassar, dan berbagai program pemerintah yang mendukung perbaikan ekonomi masyarakat.

Capaian kinerja persentase skor Pola Pangan Harapan dihitung sebagai berikut :

$$x = \frac{\text{Skor Pola Pangan Harapan}}{\text{Target Skor Pola Pangan Harapan}} \times 100\% \\ = 105,56 \%$$

Untuk lebih detilnya mengenai Skor Pola Pangan Harapan Kota Makassar 2024, dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.4 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan Kelompok Pangan

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% (AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.244	60,9	59,2	0,5	30,5	29,6	25,0	25,00
2.	Umbi-umbian	32	1,6	1,5	0,5	0,8	0,8	2,5	0,76
3.	Pangan Hewani	268	13,1	12,8	2,0	26,3	25,5	24,0	24,00

4.	Minyak dan Lemak	226	11,1	10,8	0,5	5,5	5,4	5,0	5,00
5.	Buah/Biji Berminyak	8	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	1,0	0,19
6.	Kacang-kacangan	57	2,8	2,7	2,0	5,5	5,4	10,0	5,4
7.	Gula	58	2,8	2,8	0,5	1,4	1,4	2,5	1,38
8.	Sayur dan Buah	118	5,8	5,6	5,0	28,8	28,0	30,0	28,01
9.	Lain-lain	31	1,5	1,5	-	-	-	-	0,00
Total		2.041	100,0	97,2		99,0	96,3	100,0	89,73

Sumber Data : DKP Kota Makassar, 2024

Secara umum, tingkat konsumsi energi penduduk kota Makassar telah terpenuhi sebesar 2.041 kkal/kap/hr, dengan kontribusi kecukupan energi 97,2%, yang artinya penduduk kota Makassar tergolong tahan pangan. Akan tetapi pola konsumsi pangan penduduk masih belum beragam dan berimbang, cenderung mengkonsumsi bahan makanan yang sama setiap hari, hal ini ditandai dengan skor pola pangan harapan sebesar 89,73 sedangkan angka ideal yang diharapkan sebesar 94 (Berdasarkan RPJMN 2019-2023).

Secara keseluruhan, penduduk kota Makassar masih tergantung pada konsumsi beras, masyarakat masih beranggapan belum kenyang sebelum makan nasi. Konsumsi pangan lokal yang dianggap sebagai pangan alternatif pengganti beras masih sangat rendah. Strategi peningkatan konsumsi dan ketersediaan pangan dapat ditempuh melalui peningkatan produksi kebun atau lahan sekitar rumah sebagai bentuk konsumsi keanekaragaman buah dan sayuran, serta budidaya ternak kecil dan ikan berbasis sumber daya local. Strategi peningkatan konsumsi dan ketersediaan sayur dan buah ditekankan pada pisang, papaya dan sayur hijau yang relative tidak tergantung pada musim.

**Tabel 3.5 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan	78,80	83,60	83,9	85,2	89,73

Sumber : Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar, Tahun 2024

Untuk lebih detailnya mengenai Skor Pola Pangan Harapan Kota Makassar 2023, dapat dilihat pada tabel 3.6

**Tabel 3.6. Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Berdasarkan Kelompok Pangan**

No	Kelompok Pangan	Justifikasi		Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kuesioner	Tren		Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1,0000	1,0000	317,3	1.244	60,9	59,2	0,5	30,5	29,6	25,0	25,00
2	Umbi-umbian	1,0000	1,0000	30,3	32	1,6	1,5	0,5	0,8	0,8	2,5	0,76
3	Pangan Hewani	1,0000	1,0000	166,7	268	13,1	12,8	2,0	26,3	25,5	24,0	24,00
4	Minyak dan Lemak	1,0000	1,0000	25,4	226	11,1	10,8	0,5	5,5	5,4	5,0	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	1,0000	1,0000	1,4	8	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	1,0	0,19
6	Kacang-kacangan	1,0000	1,0000	23,2	57	2,8	2,7	2,0	5,5	5,4	10,0	5,4
7	Gula	1,0000	1,0000	15,3	58	2,8	2,8	0,5	1,4	1,4	2,5	1,38
8	Sayur dan Buah	1,0000	1,0000	256,7	118	5,8	5,6	5,0	28,8	28,0	30,0	28,01
9	Lain-lain	1,0000	1,0000	58,8	31	1,5	1,5	-	-	-	-	0,00
Total					2.041	100,0	97,2		99,0	96,3	100,0	89,73

Pencapaian target skor pola pangan harapan yang didominasi oleh pola konsumsi sayur dan buah-buahan mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi, beragam, seimbang, sehat, dan aman berbasis pangan lokal semakin meningkat.

Faktor Pendukung dan Penghambat serta Tindak Lanjut pada kegiatan ini adalah :

• **Faktor Pendorong :**

- Dukungan aplikasi Bapanas dalam penentuan angka konsumsi dan angka SUSENAS
- Nilai target Skor PPH yang memenuhi target disebabkan peningkatan konsumsi masyarakat dalam pemenuhan gizi.

• **Faktor Penghambat**

- Penginputan PPH menggunakan aplikasi sehingga kadang menjadi penghambat dalam penginputan data karena sumber daya manusia yang terbatas dalam pengolahan data.

• **Tindak Lanjut :**

- Sosialisasi program dan kegiatan secara menyeluruh terkait peningkatan ketahanan pangan di tingkat kelurahan.
- Diperlukan peningkatan Capacity Building bagi Tim Pengelola Data dan Analisis

INDIKATOR RENCANA STRATEGIS III dan IV

Ketersediaan Energi dan Protein

Tahun	Target	Realisasi
2022	Energi : 2.600 kkal/kapita/hari Protein : 126 gr/kapita/hari	Energi : 2.716 kkal/kapita/hari Protein : 73,71 gr/kapita/hari
2023	Energi : 2.600 kkal/kapita/hari Protein : 126 gr/kapita/hari	Energi : 2.782 kkal/kapita/hari Protein : 80,69 gr/kapita/hari
2024	Energi : 2.700 kkal/kapita/hari Protein : 127 gr/kapita/hari	Energi : 2.812 kkal/kapita/hari Protein : 88,21 gr/kapita/hari
(84,06%) Berhasil		

Program Ketersediaan dan Produksi Pangan diukur melalui 2 (dua) Indikator yaitu 1) Ketersediaan energi dan protein per kapita; dan 2) Produksi tanaman pangan lahan pekarangan.

Capaian ketersediaan energi per kapita dapat dihitung sebagai berikut :

$$x = \frac{\text{Ketersediaan Energi per Kapita}}{\text{Target ketersediaan Energi per Kapita}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2812 \text{ Kkal/kapita}}{2.700 \text{ Kkal/kapita}} \times 100\%$$

$$x = 104,14 \%$$

Sedangkan untuk capaian protein per kapita dihitung sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Ketersediaan Protein per Kapita}}{\text{Target ketersediaan Protein per Kapita}} \times 100\%$$

$$x = \frac{88,21 \text{ Kkal/kapita}}{127 \text{ Kkal/kapita}} \times 100\%$$

$$x = 69,45 \%$$

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) salah satunya adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah. Indikator ini memberikan informasi terkait ketersediaan energi masyarakat terhadap target yang direkomendasikan WNPX Tahun 2012. Untuk standar WNPX nilai ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal dan protein 63 gram.

Data yang digunakan untuk pengolahan NBM Tahun 2024, menggunakan data Tahun 2023. NBM dalam pengolahannya menggunakan data sekunder dari Dinas Pertanian dan Perikanan berupa data produksi pangan, data dari Bulog berupa data stok beras, data dari Balai Karantina Pertanian Makassar berupa data impor dan ekspor bahan pangan, data dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar berupa data stok dari distributor, ketersediaan hasil pemantauan

enumerator DKP, dan data dari Badan Pusat Statistik berupa data jumlah penduduk. Pada pengolahan data NBM untuk data produksi terdiri dari data hasil produksi bahan pangan, data impor terdiri dari data stok dari distributor, data impor dari Balai Karantina Pertanian Makassar dan data ketersediaan dari enumerator DKP, data dari bulog. Selanjutnya hasil pengolahan data tersebut diperoleh nilai ketersediaan energi, protein dan lemak. Hasil pengolahan data NBM dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 3.7 Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Hari)	Protein (gram/hari)	Lemak (gram/hari)
Padi-padian	1.388	33,65	6,31
Makanan berpati	118	0,76	0,23
Gula	348	-	-
Buah/biji berminyak	189	20	8,26
Buah-buahan	14	0,15	0,06
Sayur-sayuran	105	4	1
Daging	256	19,07	19,35
Telur	106	8,51	7,41
Susu			
Ikan	30	1,29	(0,34)
Minyak & Lemak	258	0,30	29,09
Total	2.812	88,21	71,35
Nabati	2.454	60,50	45,02
Hewani	358	27,71	26,34

Sumber Data : DKP Kota Makassar, 2024

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Angka Kecukupan Energi tahun 2024 sebesar 2.812 kkal/kap/hari dibandingkan dengan angka rekomendasi WNPG sebesar 2.400 kkal/kap/hari sehingga diperoleh rasio sebesar 117,17 %. Jika dibandingkan dengan target rasio AKE (Angka Kecukupan Energi) tahun 2023 sebesar 115,92 %, maka capaiannya tersebut sudah dikategorikan baik. Peningkatan ketersediaan tersebut terjadi karena kontribusi dari kelompok pangan padi-padian, gula, buah-buahan, sayuran, daging dan telur. Adapun faktor pendorong naiknya nilai tersebut adalah berasal dari impor , impor disini adalah barang masuk diluar Kota Makassar baik itu dari Kabupaten/kota dalam Provinsi SulSel maupun yang berasal dari luar Provinsi SulSel. Untuk kelompok daging peningkatan tidak hanya bersumber dari impor namun juga adanya peningkatan produksi khususnya daging ayam.

NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Melalui pengolahan data NBM diperoleh

ketersediaan energi, protein dan lemak. Kabupaten/ kota dikatakan ketersediaan nya bagus Ketika nilainya sudah melebihi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Adapun ketersediaan energi, protein dan lemak selama kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2.5. berikut;

Tabel 3.8. Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Tahun 2022-2024

Tahun	Ketersediaan		
	Energi (kkal)	Protein (gram)	Lemak (gram)
2022	2.716	71,31	133,04
Nabati	2.396,35	46,40	109,72
Hewani	319,34	24,93	23,43
2023	2.782	80,69	97,46
Nabati	2.546,88	61,24	80,98
Hewani	235,04	19,45	16,48
2024	2.812	88,21	71,35
Nabati	2.454	60,50	45,02
Hewani	358	27,71	26,34

Persentase kenaikan nilai ketersediaan energi dan protein jika dibandingkan dengan standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari dan ketersediaan protein sebesar 63 gram/kapita/hari yang secara rinci disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.9 Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Tahun 2022-2024

Tahun	Ketersediaan (per kapita per hari)		Persentase ketersediaan terhadap rekomendasi WNPG Th 2012	
	Energi (Kalori)	Protein (gram)	Energi (%)	Protein (%)
2022	2.716	71,31	113,17	113,22
2023	2.782	80,69	115,92	128,07
2024	2.812	88,21	117,17	140,02

Tabel 3.10 . Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan

Kelompok bahan pangan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Energi	Protein	Lemak	Energi	Protein	Lemak	Energi	Protein	Lemak
Padi-padian	1,112.21	25.91	7.52	1,367.00	32.88	6.83	1,388.00	33.65	6.31
Makanan berpati	11.04	0.09	0.08	162.46	1.06	0.32	118.00	0.76	0.23
Gula	127.60	0	0	134.94	0	0	348.00		
Buah/biji berminyak	179.32	14.49	6.63	223.99	22.33	10.65	189.00	20.00	8.26
Buah-buahan	2.63	0.03	0.01	9.30	0.10	0.06	14.00	0.15	0.06
Sayur-sayuran	124.09	4.92	0.92	97.37	4.23	0.98	105.00	4.00	1.00
Daging	238.44	16.26	18.81	92.17	6.65	7.09	256.00	19.07	19.35
Telur	61.01	4.91	4.28	128.69	10.37	9.02	106.00	8.51	7.41
Susu									
Ikan	19.88	3.76	0.34	14.18	2.44	0.37	30.00	1.29	-0.34
Minyak & Lemak	839.45	0.96	94.55	551.82	0.63	62.16	258.00	0.30	29.09
Total	2716	71.31	133.04	2782	80.69	97.46	2812	88.21	71.35

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara garis besar kelompok bahan makanan diatas skornya untuk tahun 2024 diatas skor maks, hanya 3 kelompok yang nilainya dibawah skor maks antara lain; buah/biji berminyak, umbi-umbian, dan sayuran dan buah. Walaupun masih ada 3 kelompok yang belum memenuhi, namun jika dilihat dari total skor PPH sebesar 93,72 artinya konsumsi pangan masyarakat Kota Makassar cukup beragam dan bergizi.

1. Kelompok Padi-Padian

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein dari tahun 2022 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Pada kelompok ini ada 2 (dua) komoditi yang berkontribusi yaitu beras dan jagung basah. Beras adalah komoditi yang paling besar kontribusinya, besarnya kontribusi beras dipengaruhi oleh produksi serta barang masuk dari kabupaten di luar Kota Makassar. Sedangkan komoditi yang kontribusinya paling rendah adalah komoditi jagung basah. Rendahnya nilai ketersediaan tersebut dikarenakan rendahnya produksi jagung basah, kebanyakan masyarakat utamanya SulSel menanam jagung kering untuk pakan ternak yang nilai jualnya lebih tinggi.

2. Kelompok Makanan Berpati

Tahun 2022-2024 ketersediaan untuk kelompok ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan karena tidak adanya data produksi untuk tahun 2024 pada kelompok ini. Pada kelompok ini komoditi yang berkontribusi menyumbang nilai ketersediaan energi, protein dan lemak adalah ubi jalar. Nilai tersebut berasal dari produksi dan barang masuk dari luar Kota Makassar.

3. Kelompok Gula

Pada kelompok pangan ini dari Tahun 2022-2024 ketersediaan energi, protein dan lemak cenderung mengalami peningkatan. Ada 2 komoditi dalam kelompok ini yaitu gula pasir dan gula mangkok. Peningkatan ketersediaan energi dan protein dikarenakan adanya peningkatan barang masuk untuk komoditi tersebut, untuk barang masuk sendiri berasal dari Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone dan Surabaya.

4. Kelompok Buah/Biji Berminyak

Ketersediaan energi, protein dan lemak Tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan tersebut dikarenakan tidak adanya data produksi pada kelompok ini. Pada kelompok ini ada 5 komoditi antara lain; kacang tanah berkulit, kacang tanah lepas kulit, kedelai, kacang hijau, kelapa daging dan kopra. Diantara 5 komoditi tersebut, komoditi penyumbang nilai ketersediaan adalah kedelai dan kacang hijau, kontribusi komoditi tersebut berasal dari barang masuk.

5. Kelompok Buah-Buahan

Pada kelompok ini kurun waktu Tahun 2022-2024 cenderung mengalami peningkatan untuk ketersediaan energi, protein dan lemak. Peningkatan tersebut berasal dari naiknya data barang masuk, untuk barang masuk sendiri diperoleh dari data Balai Karantina. Kota Makassar bulan merupakan sentra produksi buah, sehingga data produksi untuk kelompok ini sangat kurang. Kota Makassar hanya memproduksi buah jambu, mangga, belimbing, dan pisang.

6. Kelompok Sayur-Sayuran

Data ketersediaan energi Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh naiknya data barang masuk kelompok pangan ini. Untuk sayur-sayuran sendiri kebanyakan pasokan yang masuk di Kota Makassar berasal dari Kabupaten Gowa, Enrekang, dan Bantaeng, serta ada pula dari luar SulSel. Data barang masuk diperoleh selain dari Balai karantina, juga data barang masuk hasil pemantauan enumerator Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

7. Kelompok Daging

Ketersediaan energi, protein dan lemak untuk kelompok ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke Tahun 2024. Peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya data produksi dan barang masuk untuk kelompok pangan ini. Komoditi yang paling besar kontribusinya pada kelompok ini adalah daging

ayam ras. Selain itu daging sapi juga barang masuknya besar, sehingga menambah kontribusi ketersediaan energi pada kelompok ini.

8. Kelompok Telur

Tahun 2023 ke tahun 2024, ketersediaan energi, protein dan lemak pada kelompok ini menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan data impor, telur ayam ras. Untuk telur ayam ras yang ada di Kota Makassar dipasok dari Kabuapten Sidrap. Pada kelompok ini yang berkontribusi adalah telur ayam ras.

9. Kelompok Susu

Ketersediaan energi, protein dan lemak pada kelompok ini nilainya 0. Tidak adanya kontribusi pada kelompok ini dikarenakan tidak adanya data produksi dan barang masuki untuk komoditi susu sapi dan susu impor. Untuk pendataan DKP sendiri di pasar modern dan tradisonal hanya olahan susu, bukan susu murni . Hal inilah yang menyebabkan kontribusi komoditi tersebut adalah 0.

10. Kelompok Ikan

Ketersediaan energi, protein dan lemak berdasarkan diatas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Naiknya barang masuk menjadi faktor pendorong naiknya ketersediaan kelompok pangan ini. Untuk data barang masuk berasal dari Balai Karantina. Pada kelompok ini komoditi yang palingg besar kontribusinya adalah barang masuk rumput laut.

11. Kelompok Minyak dan Lemak

Kurun waktu 3 tahun dari tahun 2022-2024 ketersediaan energi kelompok ini cenderung mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan turunnya nilai barang masuk untuk kelompok pangan ini. Komoditi yang berkontribusi pada kelompok ini adalah minyak goreng kelapa. Untuk minyak goreng kelapa pasokan yang ada di Kota Makassar berasal dari Pulau Jawa.

Hasil Pengolahan NBM Menggunakan Aplikasi Online NBM BAPANAS

Hasil pengolahan NBM dengan menggunakan formula excel zona I berbeda dengan hasil dari aplikasi NBM online milik BAPANAS. Adapun data yang digunakan untuk kedua pengolahan data adalah sama baik data produksi, impor, ekspor maupun stok. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel. 3.11. Formulasi NBM Online

Kelompok Bahan Pangan	Formula Excel Zona I			Aplikasi NBM Online BAPANAS		
	Energi (kalori/Hari)	Protein (gram/hari)	Lemak (gram/hari)	Energi (Kalori/Hari)	Protein (gram/hari)	Lemak (gram/hari)
Padi-padian	1.388	33,65	6,31	1.383	33,55	6,23
Makanan berpati	118	0,76	0,23	118	0,76	0,23
Gula	348	-	-	348	0	0
Buah/biji berminyak	189	20	8,26	189	20	8,26
Buah-buahan	14	0,15	0,06	14	0,15	0,06
Sayur-sayuran	105	4	1	105	4,47	0,82
Daging	256	19,07	19,35	256	19,07	19,35
Telur	106	8,51	7,41	106	8,51	7,41
Susu	0	0	0	0	0	0
Ikan	30	1,29	(0,34)	54	5,07	0,51
Minyak & Lemak	258	0,30	29,09	260	0,30	29,25
Total	2.812	88,21	71,35	2.832	91,89	72,12

Perbandingan hasil diatas menunjukkan adanya perbedaan hasil pada total ketersediaan energi, protein dan lemak. Penyebab perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel yang dibold warna ungu, yaitu pada kelompok padi-padian; ikan; minyak dan lemak. Untuk aplikasi NBM Online, dilakukan dengan mengupload data mulai data produksi, stok, impor, dan ekspor di link <https://sinbm.badanpangan.go.id> kemudian mengklik kirim dan muncullah hasilnya

Tantangan Dalam Penyusunan Neraca Bahan Makanan

Ada beberapa tantangan dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), antara lain:

1. Belum mahirnya pengolah data dalam mengolah neraca bahan makanan (NBM), sehingga masih perlu pelatihan guna penyempurnaan laporan hasil NBM.
2. Data untuk kelompok susu masih kosong, dikarenakan data yang ada di lapangan hanya data olahan susu sedangkan kelompok ini ada dua komoditi yaitu susu sapi dan susu impor.
3. Ada instansi yang kurang kooperatif dalam memberikan data sehingga memperlambat pengolahan data NBM.

Faktor Pendukung, penghambat dan Tindak Lanjut pada Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagai berikut :

Faktor Pendukung : Dukungan data dari beberapa SKPD terkait

Faktor Penghambat :

- Agar pengolah data maupun penyusun NBM mahir dalam penyusunan laporan, maka diperlukan bimtek penyusunan NBM.
- Ketersediaan data secara tepat waktu dari Instansi terkait

Tindak Lanjut :

- Telah dilakukan pengusulan untuk pelaksanaan BIMTEK penyusunan NBM di tahun berikutnya
- Akan dilakukan koordinasi secara intens dengan penyedia data sebanyak 4 kali (triwulan) , serta perlu ketegasan kepada penyedia data (SKPD terkait yang diberi honor) atas keterlambatan data, supaya tidak menghambat dalam pengolahan data.

INDIKATOR RENCANA STRATEGIS V

Jumlah Lorong Wisata

Tahun	Target	Realisasi
2022	500 lorong	391
2023	500 lorong	620
2024	300 lorong	283
(%) Sangat Berhasil		

Adapun program yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Lorong Wisata yakni Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Adapun yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan kepada Masyarakat berupa Benih tanaman cabe, sayuran dan saprodi lainnya, dalam rangka mensukseskan program strategis Lorong wisata , Dimana capaian pada tahun 2024 realisasi yang dicapai adalah 283 lorong wisata.

Berdasarkan Target Renstra dan RPJMD Lorong wisata ditargetkan sebanyak 2.500 lorong wisata, namun berdasarkan implementasinya , menurut arahan Walikota Makassar, semua OPD untuk terlibat di 1000 lorong wisata tiap tahunnya hingga mencapai 5.000 lorong wisata di akhir masa Renstra di Tahun 2026.

Berikut beberapa kegiatan dalam pelaksanaan pemenuhan Lorong wisata pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar :

Gambar 2. Pemberdayaan Lorong Wisata



INDIKATOR RENCANA STRATEGIS VI

Jumlah Training Skill Gratis

Tahun	Target	Realisasi
2022	200 orang	200 orang
2023	100 orang	100 orang
2024	0 orang	0 orang
(0 %) Telah memenuhi Target Kota		

Adapun program yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Lorong Wisata yakni Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Pada pelaksanaannya kegiatan pelatihan skill training gratis ini melibatkan kelompok Wanita tani yang memiliki usaha di daerah Lorong wisata yang pelaksanaannya dilakukan dengan Kerjasama Bersama Poltekpar Kota Makassar dengan mengeluarkan sertifikasi kepada masing-masing peserta selama 3 hari dan 2 angkatan. Namun pada tahun 2024, kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan mengingat target strategis Walikota Makassar sebanyak 10.000 skill training gratis telah terpenuhi berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan.

INDIKATOR RENCANA STRATEGIS VII

Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

Tahun	Target	Realisasi
2022	23,52 %	23.52 %
2023	17,64 %	17,64 %
2024	11,76 %	11,76 %
(100 %) Sangat Berhasil		

Indikator dan Hasil Analisis Data FSVA 2024 :

Indikator yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security & Vulnerability Atlas* (FSVA) perkotaan tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan dengan menggunakan data tahun sebelumnya yaitu data tahun 2023. Indikator-indikator ini sudah merupakan ketentuan yang baku dan digunakan oleh seluruh Kota di Indonesia, sehingga indikator ini juga yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024.

Indikator tersebut adalah (1) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; (2) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk; (3) Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara; (4) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (5) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Output Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Level Kelurahan:

1. Diketuainya wilayah-wilayah yang terindikasi mengalami kerentanan dan ketahanan pangan di Kota Makassar pada tingkat kelurahan.
2. Diketuainya faktor-faktor penyebab terjadinya kerentanan pangan di suatu wilayah kelurahan yang berada di Kota Makassar tahun 2023, agar penanganannya lebih terfokus.
3. Diketuainya jumlah wilayah yang terindikasi mengalami ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2023.
4. Diketuainya perkembangan situasi ketahanan dan kerentanan pangan di Kota Makassar tingkat kelurahan setiap tahunnya.
5. Laporan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* - FSVA) tahun 2024 Kota Makassar level kelurahan

Outcome Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (FSVA) Level Kelurahan :

1. Tersedianya data situasi dan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di Makassar tingkat kelurahan.
2. Terpantaunya wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan di Makassar khususnya pada tingkat kelurahan agar penanganannya lebih mudah, terarah dan terfokus berdasarkan faktor-faktor penyebabnya.
3. Terbitnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tiap indikator individu dan komposit yang tersebar di 153 kelurahan dan 15 kecamatan se-Kota Makassar.

Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan komposit tahun 2024 di 153 Kelurahan yang berada di 15 kecamatan, menunjukkan bahwa tidak terdapat kelurahan yang terindikasi prioritas 1 atau terindikasi sangat rentan terhadap kerawanan pangan yang digambarkan dengan warna merah tua pada peta. Terdapat 1 (0,65%) Kelurahan yang terindikasi prioritas 2 atau terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan yang digambarkan pada peta dengan gradasi warna merah yang berada di Kec. Ujung Tanah. Untuk prioritas 3 atau Kelurahan terindikasi agak rentan terhadap kerawanan pangan yang digambarkan pada peta dengan gradasi warna merah muda terindikasi 4 (2,61%) kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan yaitu masing-masing 1 kelurahan di Kecamatan Makassar, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang. Prioritas 4 atau kelurahan agak tahan terhadap kerawanan pangan ditandai dengan gradasi warna hijau muda pada peta terdapat di 28 kelurahan (18,30%) yang tersebar di 9 Kecamatan yaitu masing-masing 1 kelurahan di Kecamatan Bontoala, Ujung Tanah, dan Kep. Sangkarrang, Kecamatan Mariso dan Panakkukang masing-masing 2 kelurahan. Masing-masing 3 kelurahan di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Kecamatan Makassar 4 kelurahan, Kecamatan Tamalate 5 kelurahan, dan Kecamatan Tallo 6 kelurahan.

Kelurahan yang terindikasi prioritas 5 atau terindikasi tahan terhadap kerawanan pangan yang digambarkan pada peta dengan gradasi warna hijau terdapat di 58 (37,90%) kelurahan yang tersebar di 14 Kecamatan yaitu Kecamatan Tamalanrea 1 kelurahan, Kecamatan Ujung Pandang dan Kep. Sangkarrang masing-masing 2 kelurahan, Kecamatan Makassar dan Ujung Tanah masing-masing 3 kelurahan. Masing-masing 4 kelurahan di Kecamatan Mariso, Wajo, Tallo, Panakkukang dan Biringkanaya. Kec. Tamalate terdapat 5 kelurahan, Kec. Mamajang 6 kelurahan dan masing-masing 8 kelurahan di Kec. Rappocini dan Manggala.

Prioritas 6 atau kelurahan yang sangat tahan terhadap kerawanan pangan yang digambarkan pada peta dengan gradasi warna hijau tua terdapat di 62 (40,52%) Kelurahan pada 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Tamalate 1 kelurahan, Kecamatan Mariso, Rappocini, dan Ujung Tanah masing-masing 3 kelurahan. Terdapat masing-masing 4 kelurahan di Kecamatan Wajo, Tallo, Panakkukang, Biringkanaya dan

Tamalanrea. Kecamatan Makassar 6 kelurahan, Kecamatan Mamajang 7 kelurahan, Kecamatan Ujung Pandang 8 kelurahan dan 11 kelurahan di Kecamatan Bontoala. Jika melihat dan membandingkan kondisi status kerentanan dan ketahanan pangan (prioritas 1-6) pada tabel 2.3 diatas, pada umumnya terjadi kenaikan pada semua prioritas ketahanan pangan (prioritas 2-6) kecuali pada prioritas 1 yang tetap. Dimana pada tahun 2023 tidak terdapat kelurahan (0%) status wilayah kelurahan yang terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan atau prioritas 2 sedangkan di tahun 2024 meningkat menjadi 1 kelurahan (0,65). Kelurahan dengan status agak rentan terhadap kerawanan pangan atau prioritas 3 naik dari 0 kelurahan (0%) pada tahun 2023 menjadi 4 kelurahan (2,61%) pada tahun 2024. Pada tahun 2023 jumlah kelurahan dengan status agak tahan pangan atau prioritas 4 sejumlah 2 kelurahan (1,31%) menjadi 28 kelurahan (18,30%) pada tahun 2024 atau terjadi kenaikan sebanyak 26 kelurahan (16,99%). Kelurahan dengan status tahan pangan atau prioritas 5 mengalami kenaikan sejumlah 43 kelurahan (28,10%) yaitu 15 kelurahan (9,80) pada tahun 2023 dan 58 kelurahan (37,91%) pada tahun 2024.

Berdasarkan grafik yang diperoleh (terlampir) :

1. Jika melihat dan membandingkan kondisi status kerentanan dan ketahanan pangan (prioritas 1-6) pada tabel 2.3 diatas, pada umumnya terjadi kenaikan pada semua prioritas ketahanan pangan (prioritas 2-6) kecuali pada prioritas 1 yang tetap. Dimana pada tahun 2023 tidak terdapat kelurahan (0%) status wilayah kelurahan yang terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan atau prioritas 2 sedangkan di tahun 2024 meningkat menjadi 1 kelurahan (0,65). Kelurahan dengan status agak rentan terhadap kerawanan pangan atau prioritas 3 naik dari 0 kelurahan (0%) pada tahun 2023 menjadi 4 kelurahan (2,61%) pada tahun 2024. Pada tahun 2023 jumlah kelurahan dengan status agak tahan pangan atau prioritas 4 sejumlah 2 kelurahan (1,31%) menjadi 28 kelurahan (18,30%) pada tahun 2024 atau terjadi kenaikan sebanyak 26 kelurahan (16,99%). Kelurahan dengan status tahan pangan atau prioritas 5 mengalami kenaikan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan status pada Prioritas 2-6 khususnya pada daerah yang rentan rawan pangan (Prioritas 2 dan Prioritas 3) berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota Makassar tahun 2024 yaitu: (1) indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total penduduk; (2) Indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; (3) Indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; dan (4). Indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam

penentuan daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan Kota Makassar tahun 2024 adalah indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan. Sementara itu, faktor yang tidak berpengaruh yaitu indikator kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3. Berdasarkan baseline data hasil analisis FSVA tahun 2019 terdapat 17 kelurahan (Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, Sudiang, Untia, Parangloe, Barombong, Ujung Tanah, Pacceraakang, Katimbang, Kapasa Raya, Lae-Lae, Minasa Upa, Bontoala Tua, Karuwisi Utara, Laikang, dan Bira). Kelurahan rawan pangan tersebut sampai tahun 2024 sudah tertangani melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui lorong wisata. Berdasarkan analisis data FSVA tahun 2024, kelurahan rawan pangan yang teridentifikasi rawan pangan ada 5 kelurahan (Camba Berua, Bara-Baraya Selatan, Cambaya, Rappojawa, dan Pandang).

Target program penanganan kerawanan pangan tahun 2024 adalah 11,76% atau sebanyak 2 kelurahan dari 17 kelurahan (baseline 2019).

Realisasi	Jumlah daerah rawan pangan yang sudah di intervensi (kelurahan) 2024	x
=	Jumlah daerah rawan pangan 2019 (baseline data)	100%)

$$\text{Realisasi} = \frac{2 \text{ Kelurahan}}{17 \text{ kelurahan}} \times 100\%$$

= 11,76 % dan target 11,76 %

Maka realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{11,76\%}{11,76\%} \times 100\% = 100\%$$

Bidang Kerawanan, Distribusi dan Cadangan Pangan melalui program penanganan kerawanan pangan dengan target tahun 2024 yaitu 11,76% dan realisasi 11,76%. Pencapaian kinerja tersebut telah dilakukan dengan pendekatan intervensi kepada KWT/KT yang berada di lorong wisata yang masuk ke dalam daerah rawan pangan. Dengan kegiatan optimalisasi pekarangan untuk ketahanan pangan maka

kebutuhan rumah tangga terhadap ketersediaan pangan dapat tercapai gizi keluarga sehingga kesehatan masyarakat dapat tercapai. Dengan aktivitas KWT/KT mampu berperan dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Adapun bentuk intervensi yang telah dilakukan dinas ketahanan pangan tahun 2024 yaitu peningkatan penyediaan pangan yang berada di lorong wisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan yang berbasis sumberdaya lokal. Selain itu terdapat bantuan bahan pangan pokok berupa intervensi pembagian cadangan pangan beras yang bersumber dari Penganggaran APBN oleh Badan Pangan Nasional melalui distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Pusat untuk masyarakat Miskin berdasarkan data DTKS.

FAKTOR PENDORONG:

- Dukungan dan kerjasama dari masyarakat, pemerintah setempat dan *stake holder* terkait yang membantu dan mempermudah dalam pengambilan data.
- Tim penginput dan pengolah data telah terampil.

FAKTOR PENGHAMBAT:

- Keterlambatan data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis dikarenakan data tersebut diolah terlebih dahulu oleh pihak skpd terkait, sehingga mengakibatkan pengolahan data juga terhambat.

TINDAK LANJUT:

- Membangun kerjasama yang baik dengan SKPD penyedia data dan melakukan komitmen penyediaan data secara *on time*;
- Sosialisasi program dan kegiatan secara menyeluruh terkait peningkatan ketahanan pangan di tingkat kelurahan;
- Sebagai bahan rekomendasi dan pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam penanganan kerawanan pangan pada level kelurahan;
- Pelatihan teknis bagi aparat pengolah data melalui bimtek penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dilakukan setiap tahun.

REKOMENDASI PENGENTASAN DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama kerawanan pangan. Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan program-program dalam pengentasan daerah rawan pangan, namun masih diperlukan penanganan yang serius dari semua pihak baik dari pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat Kota Makassar untuk menekan wilayah rentan rawan pangan lainnya, melalui program kegiatan lintas sektor.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Kota Makassar diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan jumlah sarana prasarana pangan salah satunya dengan Pengadaan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota serta Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan dalam kegiatan Lorong Wisata (Longwis) dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Dengan demikian, dapat menekan pengeluaran ekonomi keluarga dan sebaliknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi.
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan untuk menekan laju inflasi seperti Gerakan Pangan Murah dan Sidak/ Pemantauan Pasar terutama mendekati Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan infrastruktur (fasilitas) air bersih dan sanitasi.
- e. Penambahan tenaga kesehatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan.

SINERGI DAN KERJASAMA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan penanganan serius baik bagi pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pemerintah Kota sampai ke level pemerintahan terkecil yaitu pemerintah Kelurahan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Penanganan kerentanan terhadap kerawanan pangan bukan hanya tugas Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, tetapi harus melibatkan lintas sektor dengan berbagai program kegiatannya. Kerawanan pangan di Kota Makassar mustahil akan dapat teratasi jika hanya mengandalkan Dinas Ketahanan Pangan saja, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi OPD terkait untuk terlibat secara full melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kota diarahkan pada kegiatan :

- a. Optimalisasi dan intensifikasi lahan pekarangan (Longwis)
- b. Penanganan kemiskinan yang menjadi program utama Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar melalui pemberdayaan masyarakat di lorong, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM lorong untuk menggerakkan ekonomi wilayah berbasis digitalisasi (*star up digital*).
- c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.

- d. Penyediaan tenaga kesehatan untuk memperkuat imunitas masyarakat.

Program kegiatan yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dalam rangka penanggulangan dan pencegahan kerawanan pangan adalah :

1. Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Program Lorong Wisata;
2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah yang bekerjasama dengan Bulog;
3. Memberikan bantuan pangan kepada masyarakat di wilayah prioritas 2 dan 3.
4. Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan olahan yang berbasis B2SA;
5. Melakukan uji sampel pangan non pestisida dan non bahan kimia yang berbahaya lainnya guna keamanan pangan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat;
6. Melakukan monitoring stok dan harga pangan untuk bahan pokok di tingkat konsumen dan distributor;
7. Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

INDIKATOR RENCANA STRATEGIS VIII Persentase Pengawasan Keamanan Pangan

Tahun	Target	Realisasi
2022	90 %	100 %
2023	92 %	100 %
2024	94 %	100 %
(106,38 %) Sangat Berhasil		

Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari 3 Sub Kegiatan, diantaranya :

I. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Target Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2024 adalah 94 % sedangkan yang dicapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengawasan sampel pangan segar (PSAT) yang diambil secara random/acak dari pasar-pasar tradisional dan moderen (12 pasar tradisional dan 12 pasar moderen) yang ada di Kota Makassar aman dari cemaran pestisida, logam berat dan formalin berdasarkan hasil uji rapid test kit dan uji laboratorium.

Kegiatan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan melalui pengambilan sampel pangan terhadap produk pangan asal tumbuhan (PSAT) sebanyak 200 sampel di peredaran, yakni di pasar tradisional dan modern di Kota Makassar.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random sampling (acak proporsional) dengan kriteria buah dan sayuran yang diambil sebagai sampel adalah yang banyak diproduksi, banyak dikonsumsi dan dicurigai memiliki ketidakamanan untuk dikonsumsi.

Pengujian sampel akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Formalin Test Kit, Pestisida Test Kit dan Logam Berat (Pb, Cd) Test Kit untuk mengetahui kandungan formalin, pestisida, Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada buah dan sayuran dengan cara cepat, terutama pada jenis buah import dan jika terindikasi mengandung bahan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengujian kuantitatif di laboratorium.

Pengujian sampel dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi dengan parameter uji : Residu pestisida (4 golongan bahan aktif), formalin dan cemaran logam berat (Pb, Cd) dengan waktu pengujian sampel ± 2 minggu.

Berdasarkan hasil analisis sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebanyak 200 sampel yang diambil dari Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Makassar dapat disimpulkan :

1. Sampel buah (Anggur, Apel, Pear, Melon, Sunkist dan Semangka) dari Hero Mari, Mall PIPO, Lottemart Alauddin, Gelael, Hypermart Panakkukang, Hero Alauddin, Mtos, Baji Pa;mai, Lottemart Panakkukang, Satu Sama Landak, Farmers Market dan Transmart , Pengayoman) bebas dari cemaran pestisida, Timbal (Pb), Kadmium (Cd) dan Formalin.
2. Sampel sayur-sayuran (Bayam, Brokoli, Bunga Kol, Cabe Besar, Cabe Kecil, Cabe Keriting, Daun Bawang, Daun Kacang, Kacang Panjang, Kangkung, Kemangi, Kentang, Kol, Labu Siam, Mentimun, Sawi Hijau, Sawi Putih, Selada, Terong, Tomat dan Wortel) bebas dari cemaran pestisida, Timbal (Pb) dan Kadmium Cd).

Gambar 3. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan



Pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan Kegiatan GERMAS Pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan dan Ekonomi dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang keamanan pangan setiap bulan di 5 (lima) sekolah yang ada di Kota Makassar. Adapun peserta penyuluhan adalah siswa / siswi yang merupakan perwakilan dari sekolah yang dituju sebanyak 100 orang / sekolah.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan GERMAS

No.	Hari / Tanggal	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1.	Rabu / 24 April 2024	UPT. SPF. SDN Panaikang I	Jl. Urip Sumoharjo Km. 06 , Panakkukang
2.	Selasa / 30 April 2024	UPT. SPF. SDN Inpres Bertingkat Kaluku Bodoa	Jl. Teuku Umar No. 83 , Tallo
3.	Selasa / 21 Mei 2024	UPT. SPF. SDN. Inpres Antang II	Jl. Antang Raya No. 81, Manggala
4.	Rabu / 22 Mei 2024	UPT. SPF. SDN. Inpres Andi Tonro	Jl. Andi Tonro No. 60 B, Tamalate
5.	Jumat / 07 Juni 2024	UPT. SPF. SDN. Mattoangin I	Jl. Hati Mulia No. 1, Mariso

Pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan dan Ekonomi menghadirkan Narasumber dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi Sulawesi Selatan yang membawakan materi **“5 Kunci Keamanan Pangan untuk Sekolah”** dan **“Materi Suplemen (untuk komunitas guru / pengelola atau penjaja kantin)”**.

Dalam materi pertama yang dibawakan oleh Narasumber memaparkan kepada peserta mengenai hal – hal yang wajib diperhatikan dalam membeli jajanan di sekolah yaitu memberikan penjelasan kepada peserta bagaimana mengenali pangan yang aman, membeli pangan yang aman, cara membaca label pada kemasan makanan dengan seksama, menjaga kebersihan secara pribadi dan mencatat apa yang ditemui apabila ada hal – hal yang tidak sesuai prosedur keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Materi kedua yang dibawakan mengacu kepada komunitas guru, pengelola atau penjaja kantin mengenai penerapan keamanan pangan pada produk pangan yang dijual dalam lingkungan sekolah terutama untuk pangan olahan, adapun hal – hal yang harus diperhatikan yaitu pada saat pembelian bahan baku dimana harus diperhatikan tingkat kesegaran bahan baku yang dibeli, selanjutnya bagaimana penyimpanan bahan baku yang baik dan benar berdasarkan jenis bahan baku yang

dibeli, tahapan pengolahan bahan baku dengan memperhatikan kebersihan tempat pengolahan dan kebersihan personal dan bagaimana cara penyajian bahan baku yang telah diolah agar aman dari berbagai macam cemaran.

Gambar 4. Kegiatan Germas

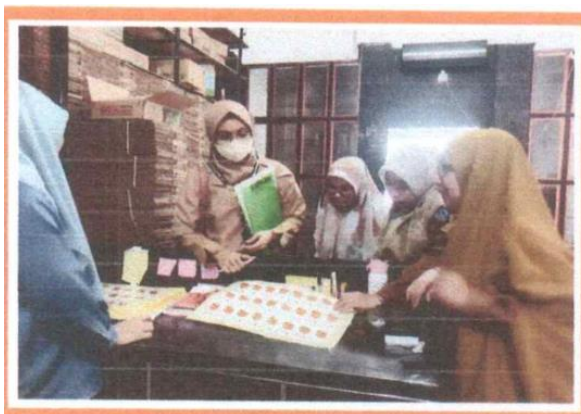


II. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar meliputi :

1. Pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan kategori mikro dan kecil di Kota Makassar.
2. Penerbitan Registrasi PSAT PDUK. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar menerbitkan total 33 nomor Registrasi PSAT PD-UK pada tahun 2024, yang terdiri dari beras premium, beras medium, dan berbagai macam rempah (Daftar Terlampir).

Diharapkan kedepannya fitur registrasi PDUK pada portal OSS bisa lebih lengkap diantaranya dapat juga ditambahkan SOP dan keterangan bahwa produk yang diproduksi berasal dari dalam negeri atau campuran impor. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di kabupaten/kota banyak yang belum memahami penyusunan dokumen khususnya SOP

Gambar 5 . Dokumentasi Registrasi Keamanan Pangan Tahun 2024



III. Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Pangan

Sasaran kegiatan adalah para pelaku usaha yang ada di pasar tradisional dan modern serta instansi yang terkait dalam pengawasan keamanan pangan, antara lain seperti PD Pasar, pengelola pasar modern, serta ASN dan Non ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Hasil pendataan diperoleh jumlah pedagang / pengusaha yang disesuaikan dengan catatan yang ada pada buku registrasi PD Pasar bersangkutan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar pada saat ada pembinaan, sosialisasi, pengawasan ataupun pelatihan - pelatihan mengenai keamanan pangan yang kedepan akan dilaksanakan oleh Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Gambar 5 . Dokumentasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Pangan Tahun 2024



Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB (71,30)	100%	BB	BB (73,10)	100%	BB	BB (76,80)	100%
1.1	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	90 %	90 %	111,11	90 %	100 %	111,11	90 %	98,97 %	109,96
1.2		Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	90 %	100	100 %	100 %	100	100 %	93,6 %	93,6
		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 %	100 %	110,36	90 %	99,33 %	110,36	90 %	98,8 %	109,77
2	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan	> 70,64	80,82	100%	> 70,64	83,86	100%	> 70,64	87,95	100%
2.1	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.	Ketersediaan Pangan Utama	90 %	130,67	145,18	90 %	130,67	145,18	92%	138,80	150,8
2.2		Skor Pola Pangan Harapan	82	83,9	109,27	82	89,6	109,27	85	89,73	105,56
2.3		Ketersediaan Energi Perkapita	2600	2716	107	2600	2782	107	2700	2.812	104,15
2.4		Ketersediaan Protein Perkapita	126	73,71	64,04	126	80,69	64,04	127	88,21	69,46
2.5		Jumlah Lorong wisata dan Lorong garden	500	491	123,8	500	619	123,8	300	283	94,33
2.6		Jumlah Training Skill Gratis	200	200	100	100	100	100	-	-	-
2.7		Persentase Penanganan Daerah Rawan	23,52	23,52	100	17,64%	17,64	100	11,76%	11,76	100
		Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	90%	100	111,11	92%	100	108,69	94	100	106,38

Berdasarkan data realisasi perbandingan capaian kinerja yang ditunjukkan pada tabel di atas bahwa untuk **sasaran 1. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah** dengan indikator nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 memperoleh nilai BB (73,10) dengan capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2024 memperoleh nilai BB (76,80). Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 3,7 %. Pada **sasaran 2. Meningkatkan ketahanan pangan di Masyarakat** merupakan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang juga mengalami peningkatan pada tahun

2023 memperoleh angka indeks ketahanan pangan senilai 83,86 dan pada tahun 2024 angka indeks ketahanan pangan senilai 87,95. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar 4,09 % dipengaruhi oleh aspek- aspek ketahanan pangan baik dari segi ketersediaan pangan, stabilisasi harga dan keamanan pangan masih tergolong tahan pangan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar periode diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (76,80)	A	
1.1	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	98,97 %	90	111,11
1.2		Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	93,6 %	90	111,11
1.3		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	98,8 %	100	99,33
2	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan	87,95		
2.1	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.	Ketersediaan Pangan Utama	138,80	94%	139,01
2.2		Skor Pola Pangan Harapan	89,73	90	99,55
2.3		Ketersediaan Energi Perkapita	2.812	2700	103,03
2.4		Ketersediaan Protein Perkapita	88,21	128	63,03
2.5		Jumlah Lorong wisata dan Lorong garden	283	2500	44,52
2.6		Jumlah Training Skill Gratis	-	1000	30
2.7		Persentase Penanganan Daerah Rawan	11,76	5,88	11,76
		Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	98	102,04

Berdasarkan data realisasi perbandingan capaian kinerja yang ditunjukkan pada tabel di atas bahwa untuk **sasaran 1. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah** dengan indikator nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 memperoleh nilai BB (73,10) dengan capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2024 memperoleh nilai BB (76,80). Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 3,7 %.. Pada **sasaran 2. Meningkatkan ketahanan pangan di Masyarakat** merupakan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 memperoleh angka indeks ketahanan pangan senilai 80,82 dan pada tahun 2023 angka indeks ketahanan pangan senilai 87,95. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar 4,09 % dipengaruhi oleh aspek- aspek ketahanan pangan baik dari segi ketersediaan pangan, stabilisasi harga dan keamanan pangan masih tergolong tahan pangan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standard nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional / Propinsi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (76,80)	BB	100%
1.1		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	98,97 %	-	111,11 %
1.2	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	93,6 %	-	111,11 %
1.3		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	98,8 %	-	99,33 %
2	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan	87,95	> 70,64	98,65 72,95
2.1	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan	Ketersediaan Pangan Utama	138,80	367,91 %	139,01 %
2.2		Skor Pola Pangan Harapan	89,73	Nas : 94 Prop : 83,1	99.55 %

2.3	menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.	Ketersediaan Energi Perkapita	2.812	2400 kkal	103,03 %
2.4		Ketersediaan Protein Perkapita	88,21	63 gr	63,03 %
2.5		Jumlah Lorong wisata dan Lorong garden	283	2500 lorong	44,52%
2.6		Jumlah Training Skill Gratis	-	1000 org	30%
2.7		Persentase Penanganan Daerah Rawan	11,76	30,74%	11,76%
		Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	Nas : 85 Prop : 100	102,04 %

Berdasarkan data realisasi perbandingan capaian kinerja yang ditunjukkan pada tabel di atas bahwa untuk **sasaran 1. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah** dengan indikator nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 memperoleh nilai BB (73,10) dan jika dibandingkan dengan target provinsi dengan nilai BB menunjukkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 mengalami peningkatan akuntabilitas. Pada **sasaran 2. Meningkatkan ketahanan pangan di Masyarakat** merupakan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 angka indeks ketahanan pangan senilai 87,95 dan jika dibandingkan dengan angka indeks ketahanan pangan Badan Pangan Nasional angka sementara per 31 Desember 2024 un release 76,20% sedangkan provinsi Sulawesi Selatan senilai 78.69.

Tabel 3.16

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan	> 70,64	87,95	100%		
2.1	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi	Ketersediaan Pangan Utama	92%	138,80	150,8		
2.2		Skor Pola Pangan Harapan	85	89,73	105,56	Faktor pendorong dan penghambat serta tindak lanjut pada kegiatan ini adalah : FAKTOR PENDORONG : • Dukungan aplikasi Bapanas dalam penentuan angka konsumsi dan angka Susenas	TINDAK LANJUT : • Sosialisasi program dan kegiatan secara menyeluruh terkait peningkatan ketahanan pangan di tingkat kelurahan.

	seimbang dan aman.					• Nilai target Skor PPH yang memenuhi target disebabkan peningkatan konsumsi masyarakat dalam pemenuhan gizi. FAKTOR PENGHAMBAT • Penginputan PPH menggunakan aplikasi sehingga kadang menjadi penghambat dalam penginputan data karena sumber daya manusia yang terbatas dalam pengolahan data.	
2.3		Ketersediaan Energi Perkapita	2700	2.812	104,15	• Faktor Pendukung : Dukungan data dari beberapa SKPD terkait	• Tindak Lanjut : -Telah dilakukan pengusulan penerimaan tenaga analis pada BKPSDM Kota Makassar
2.4		Ketersediaan Protein Perkapita	127	88,21	69,46	• Faktor Penghambat : - Ketersediaan tenaga Analis yang terbatas dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan - Ketersediaan data secara tepat waktu dari Instansi terkait	-Pengambilan data secara bertahap di awal Bulan Juli di beberapa OPD
2.5		Jumlah Lorong wisata dan Lorong garden	300	283	94,33	• Faktor Pendukung : Dukungan data dari beberapa SKPD, Kecamatan, kelurahan, RT/RW dan kelompok tani/ KWT • Faktor Penghambat : - Keterbatasan SDM dalam monitoring dan membina KWT/KT	- Melakukan usulan penambahan tenaga pendamping dari akademisi dalam pembinaan KT/KWT
2.6		Jumlah Training Skill Gratis	-	-	-	Telah dipenuhi oleh beberapa stakeholder	
2.7		Persentase Penanganan Daerah Rawan	11,76%	11,76	100	FAKTOR PENDORONG : • Dukungan dan kerjasama dari masyarakat, pemerintah setempat dan stake holder terkait yang membantu dan mempermudah dalam pengambilan data. • Tim penginput dan pengolah data telah terampil. FAKTOR PENGHAMBAT • Keterlambatan data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis dikarenakan data tersebut diolah terlebih dahulu oleh pihak skpd terkait, sehingga mengakibatkan pengolahan data juga terhambat.	TINDAK LANJUT : • Sosialisasi program dan kegiatan secara menyeluruh terkait peningkatan ketahanan pangan di tingkat kelurahan; • Pelatihan teknis bagi aparat pengolah data melalui bimtek penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dilakukan setiap tahun ; • Membangun Kerjasama yang

							baik dengan SKPD penyedia data.
		Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	94	100	106,38	• Faktor Pendukung : -Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Makassar (DKP Kota Makassar khususnya Bidang Keamanan Pangan) dengan UPTD Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Makassar. -Adanya Alat uji cepat atau Rapid Test Kit untuk menguji kandungan bahan berbahaya pada PSAT yang beredar. • Faktor Penghambat : -Tidak adanya Tenaga PPNS untuk PSAT /Sertifikasi pengawas keamanan pangan. -Kurangnya laboratorium yang lengkap untuk melakukan tindak lanjut uji jika ada temuan pada sampel PSAT yang diuji dengan rapid test kit. -Kurangnya pemahaman masyarakat terutama pelaku utama, pelaku usaha dan konsumen tentang bahaya penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang ataupun penggunaan bahan non organik melebihi dosis yang telah ditentukan.	Tindak Lanjut : -Mengikutkan pegawai Bimtek/ Diklat PPNS PSAT ataupun pengawas keamanan pangan. - Sosialisasi kepada pelaku utama, pelaku usaha dan konsumen (masyarakat) tentang bahaya akibat dari cemaran fisika, Biologi dan kimia pada Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh penjelasan beberapa faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan pangan. Namun secara keseluruhan pencapaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas ketahanan pangan pada tahun 2024 berjalan dengan sebagaimana mestinya tetapi masih perlu dilakukan hubungan kerjasama *crosscutting* dengan stakeholder yang terkait. Dari Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang digambarkan pada tabel 3.6 sudah tergambar beberapa saran tindak lanjut untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan tersebut.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.17

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%		Indeks Ketahanan Pangan	83,	
	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	111,11				
		Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100				
		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	110,36				
				Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
				a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	11 Dokumen	Menunjang
				b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya pelaksanaan administrasi keuangan	100 %	Menunjang
				c. Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi	100 %	Menunjang

				Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah		
				d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase . Administrasi Umum Perangkat Daerah	99 %	Menunjang
				e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang
				f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,3 %	Menunjang
				g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
2	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan	-				
2.1	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi	Ketersediaan Pangan Utama	150,8	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah lokasi peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan		

2.2	pangan yang bergizi seimbang dan aman.			a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	1 Unit	Menunjang
2.3				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Lorong garden dan Lorong wisata	300 lorong	
2.4					Jumlah training skill	0 orang	
2.5					Ketersediaan energi dan protein perkapita	2700 dan 127	
2.6					Skor pola pangan harapan	84	
2.7				a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan ketersediaan energi dan protein serta stok, pasokan dan harga pangan	1 Dokumen	Menunjang
				b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Jumlah pengelolaan Cadangan pangan pemerintah	73 ton	Menunjang

				Kabupaten/Kota			
				c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah lokasi Analisa ratio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan	1 Kota Makassar	Menunjang
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	11,76 %	
				1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah data dan informasi tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan	1 Dokumen	Menunjang
				2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan daerah rawan pangan	1 Laporan	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	
				1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan pangan segar asal tumbuhan yang aman dan bermutu	1 Laporan	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.7 di atas yang menggambarkan Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan diperoleh kesimpulan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing berperan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang dituangkan pula dalam perjanjian kinerja tahun 2023 oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13,417,580,867,00 atau 84,44 % dari alokasi anggaran Rp. 15,890,712,670,00.

Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,438,787,270	6,438,619,232	86.55%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	48,000,000	38,950,920	74.91%
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	7,611,265,700	6,327,187,701	83.13%
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	354,833,000	282,808,100	79.70%
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	437,826,700	330,014,914	75.38%
	Total	15,890,712,670	13,417,580,867	84.44%

Sumber Data : DKP Kota Makassar, 2024

Tabel di atas menyajikan data terkait anggaran, realisasi, dan capaian berbagai program yang berkaitan dengan pemerintahan daerah serta ketahanan pangan. Total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh program mencapai Rp15.890.712.670, dengan realisasi sebesar Rp13.417.580.867 atau sekitar 84,44% dari anggaran yang direncanakan.

Program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mengalokasikan Rp7.438.787.270, dengan realisasi sebesar Rp6.438.619.232 atau mencapai 86,55% dari total anggarannya.

Selanjutnya, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki anggaran Rp7.611.265.700, dengan realisasi Rp6.327.187.701 atau 83,13%. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan memiliki anggaran Rp48.000.000 dan realisasi sebesar Rp38.950.920 atau mencapai 74,91%.

Selain itu, Program Penanganan Kerawanan Pangan memiliki anggaran Rp354.833.000 dengan realisasi Rp282.808.100 atau 79,70%. Sementara itu, Program Pengawasan Keamanan Pangan memiliki anggaran Rp437.826.700 dengan realisasi Rp330.014.914 atau mencapai 75,38%.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian dari seluruh program yang dijalankan mencapai 84,44%, menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam pelaksanaan anggaran. Namun, masih terdapat beberapa program yang realisasinya belum mencapai 80%, yang dapat menjadi perhatian untuk evaluasi dan peningkatan efektivitas di masa mendatang.

3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6				
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB (76,80)	100%				
1.1	Meningkatkan akuntabilitas	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat	90 %	98,97 %	109,96	7,438,787,270	6,438,619,232	86.55 %	Efisien

	as, perencana an dan pengelola an	Daerah							
1.2	keuangan perangkat daerah.	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	93,6 %	93,6				
1.3		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 %	98,8 %	109,7 7				
2	Meningka tikan ketahanan pangan di masyarak at.	Indeks Ketahanan Pangan	> 70,64	87,95	100%				
2.1	Meningkat kan ketahanan pangan di masyarak at dengan menjaga ketersedia an pangan dan meningkat kan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.	Ketersediaan Pangan Utama	92%	138,8 0	150,8	48,000,0 00	38,950,92 0	74.91 %	Efisien
		Skor Pola Pangan Harapan	85	89,73	105,5 6	7,611,265 ,700	6,327,187,7 01	83.13 %	Efisien
		Ketersediaan Energi Perkapita	2700	2.812	104,1 5				
		Ketersediaan Protein Perkapita	127	88,21	69,46				
		Jumlah Lorong wisata dan Lorong garden	300	283	94,33				
		Jumlah Training Skill Gratis	-	-	-				
		Persentase Penanganan Daerah Rawan	11,76%	11,76	100	354,833, 000	282,808,10 0	79.70 %	Efisiensi
		Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	94	100	106,3 8	437,826, 700	330,014,91 4	75.38 %	Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.19 di atas tentang Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran menggambarkan kondisi penggunaan anggaran terhadap kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan tergolong efisien, dimana terlihat bahwa dari 11 indikator sasaran yang dicapai diperoleh 11 indikator yang capaian anggarannya efisien

Kondisi realisasi anggaran dituangkan pada LRA, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan.

Pemerintah Daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik untuk melihat kinerja dinas ketahanan pangan pada tahun 2023 dapat pula dilihat berdasarkan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG				15,890,712,670	13,417,580,867	84.44%	
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	96,2%	96,2	7,438,787,270	6,438,619,232	86.55%	
	a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100	163,788,500	109,663,500	66.95%	Efisien
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	99.6 %	100	5,928,590,370	4,790,420,311	80.80%	Efisien
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	98,8 %	100	519,000,000	457,972,867	88.24%	Kurang Efisien
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	99 %	96.0 %	100	793,259,500	598,993,204	75.51%	Efisien

	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 %	0 %	99	0	0	0	Efisien
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	94,52 %	98,3	389,052,900	365,870,900	94.04%	Efisien
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90,15%	100	164,096,000	115,698,450	70.51%	Efisien
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			100	48,000,000	38,950,920	74.91%	Efisien
2.2	a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	100	48,000,000	38,950,920	74.91%	Efisien
2.3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	300 lorong	283 lorong	94,3	7,611,265,700	6,327,187,701	83.13%	Efisien
2.7	a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	455,817,500	334,102,694	73.30%	Efisien
	b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	20 ton	20 ton	100	324,400,800	248,327,500	76.55%	Efisien
	c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Kota Makassar	1 Kota Makassar	99,3	6,831,047,400	5,744,757,507	84.10%	Efisien
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	11,76 %	11,76 %	100	354,833,000	282,808,100	79.70%	Efisien
	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	138,699,000	130,970,400	94.43%	Efisien
	2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100	216,134,000	151,837,700	70.25%	Efisien
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	100 %	100	437,826,700	330,014,914	75.38%	Efisien
	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100	437,826,700	330,014,914	75.38%	Efisien

Berdasarkan tabel 3.20 di atas menunjukkan Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan yang mana dari ke 5 (lima) program yang dijalankan Dinas ketahanan pangan pada dasarnya menunjukkan keefisienan penggunaan anggaran.

Analisis Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan anggaran yang digunakan. Dari total Rp15.890.712.670 yang dialokasikan untuk belanja langsung, realisasi anggaran mencapai Rp13.417.580.867 atau 84,44%, yang menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki target kinerja 100% dengan realisasi sebesar 96,2%, menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari total anggaran Rp7.438.787.270, realisasi anggaran mencapai Rp6.438.619.232 (86,55%), yang berarti program ini berjalan dengan efisien.

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target 11 dokumen tercapai 100%, namun efisiensi anggaran hanya 66,95%, menunjukkan potensi penghematan.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Capaian 99,6% dengan efisiensi 80,80%, yang masih dalam kategori efisien.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Capaian 98,8%, tetapi efisiensi hanya 88,24%, yang menunjukkan sedikit ketidakefisienan.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
Capaian 96% dengan efisiensi 75,51%, masih dalam kategori efisien.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian 94,52% dengan efisiensi 94,04%, sangat efisien.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Capaian 90,15% dengan efisiensi 70,51%, menunjukkan area yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini memiliki realisasi anggaran Rp38.950.920 dari alokasi Rp48.000.000, dengan efisiensi 74,91%, yang masih tergolong efisien. Target infrastruktur pendukung tercapai 100%.

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Capaian 94,3% dari target 300 lorong menunjukkan pelaksanaan yang baik.
- Realisasi anggaran Rp6.327.187.701 dari Rp7.611.265.700 menghasilkan efisiensi 83,13%.

Kegiatan dalam program ini juga berjalan efisien:

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
Target 1 dokumen tercapai 100% dengan efisiensi 73,30%.
- Pengelolaan Cadangan Pangan
Target 20 ton cadangan pangan tercapai 100% dengan efisiensi 76,55%.
- Pelaksanaan Konsumsi Pangan Perkapita
Capaian 99,3% dengan efisiensi 84,10%, menunjukkan kinerja yang baik.

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Target 11,76% daerah rawan pangan tertangani tercapai 100%.
- Realisasi anggaran Rp282.808.100 dari Rp354.833.000, dengan efisiensi 79,70%.
- Penyusunan Peta Kerentanan Pangan memiliki efisiensi **94,43%**, sedangkan penanganan daerah rawan pangan memiliki efisiensi **70,25%**, yang menunjukkan area untuk peningkatan efisiensi.

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Target 100% pengawasan keamanan pangan tercapai 100%.
- Efisiensi program 75,38%, masih dalam kategori efisien.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan sangat baik, dengan hampir semua target tercapai. Tingkat efisiensi anggaran rata-rata berkisar antara 70%-95%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Namun, ada beberapa area yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi, seperti administrasi kepegawaian dan pemeliharaan barang milik daerah.

3.4. Catatan Atas LHE Kemenpan RB

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang menjelaskan lebih lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024 bahwa pada Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Makassar pada Dinas Ketahanan Pangan merumuskan Sasaran Strategisnya belum

sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) pada level kinerjanya dan indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dan memberikan perbaikan berkelanjutan pada pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Hal ini menjadi dasar untuk perbaikan pada rencana dan penentuan indikator pada saat penyusunan Renstra yang akan datang dalam menurunkan ke Tujuan dan Sasaran dan level ke bawahnya. Misalnya dalam menentukan mandat ataupun tuisi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pandangan Masyarakat terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan serta menyiapkan *Log Frame* (Penjenjangan Kinerja). Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan perbaikan beberapa indikator kegiatan hingga sub kegiatan pada penganggaran Tahun 2025 yang sebelumnya belum tergambar pada tahun - tahun sebelumnya. Namun hal ini sudah berbeda dengan indikator yang tertuang pada Renstra 2021-2026 , begitu pula terdapat penyesuaian-penyesuaian indikator terhadap Sub Kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Semoga dengan penyusunan RENSTRA elanjutnya Dinas Ketahanan Pangan berkomitmen untuk perbaikan Dokumen Perencanaan yang lebih baik dan terukur dengan merumuskan Sasaran Strategisnya yang berorientasi hasil (outcome) pada level kinerjanya dan indikator kinerja yang relevan dan memberikan perbaikan berkelanjutan pada pencapaian kinerja yang ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Program kerja yang terjabar di dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar merupakan tahapan operasionalisasi pencapaian Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Makassar yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Program kerja ini menjadi pedoman dan acuan bagi semua perangkat yang ada dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan langkah awal pencapaian kinerja terhadap peningkatan ketahanan pangan Kota Makassar. Dokumen ini hendaknya dijadikan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih terperinci.

Berdasarkan laporan akuntabilitas dan kinerja pegawai, bahwa dari 5 (lima) program dan 14 (Empat Belas) Kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) program utama dan 7 (tujuh) Kegiatan dan 1 (satu) program penunjang dan 7 (tujuh) kegiatan dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar pada tahun 2024 adalah 91,70 % untuk realisasi fisik. Sedangkan untuk realisasi anggaran dengan target anggaran sebesar Rp 15,890,712,670 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 13,417,580,867,- diperoleh persentase sebesar 84.44 % atau masuk dalam kategori Tinggi.

Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam program kerja ini sangat bergantung kepada komitmen pimpinan dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang tidak terlepas dari dukungan seluruh *stakeholders*.

Capaian kinerja yang sangat baik ini disebabkan oleh semakin optimalnya kesadaran masyarakat dan sumber daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar bagi pencapaian visi Pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan untuk mewujudkan Makassar menjadi basis pelayanan penyediaan pangan yang berkualitas, bergizi, aman, dan berkelanjutan menuju Makassar menjadi kota dunia yang nyaman untuk semua.

Makassar, 3 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV.b

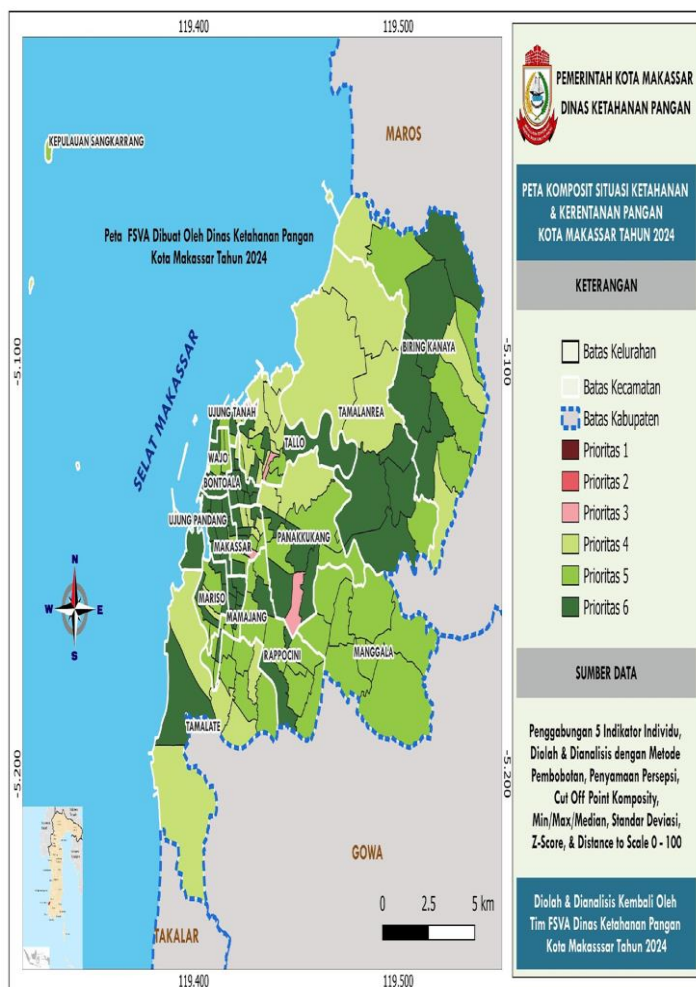
NIP. 19820930 200012 1 002

LAMPIRAN

Lampiran I. Kelurahan yang terindikasi rawan pangan

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P. Lahan	2. P. Sarana	3. P. Tdk Sejaht	4. P. Jalan	5. P. No Water	6. P. Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIOR KOMP
1	UIUNG TANAH	7371080	7371080011	CAMBA BERUA	0	4	1	4	1	2	57,45	153	2
2	MAKASSAR	7371040	7371040004	BARA-BARAYA SELAT	0	3	1	4	3	4	60,24	150	3
3	UIUNG TANAH	7371080	7371080012	CAMBAYA	0	3	1	4	1	3	59,90	152	3
4	TALLO	7371090	7371090005	RAPPOJAWA	0	1	1	4	6	5	60,54	149	3
5	PANAUKUKANG	7371100	7371100009	PANDANG	0	3	4	4	1	2	59,96	151	3

Lampiran 2. Hasil peta komposit tahun 2024 yang menggambarkan gabungan dari ke-5 indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

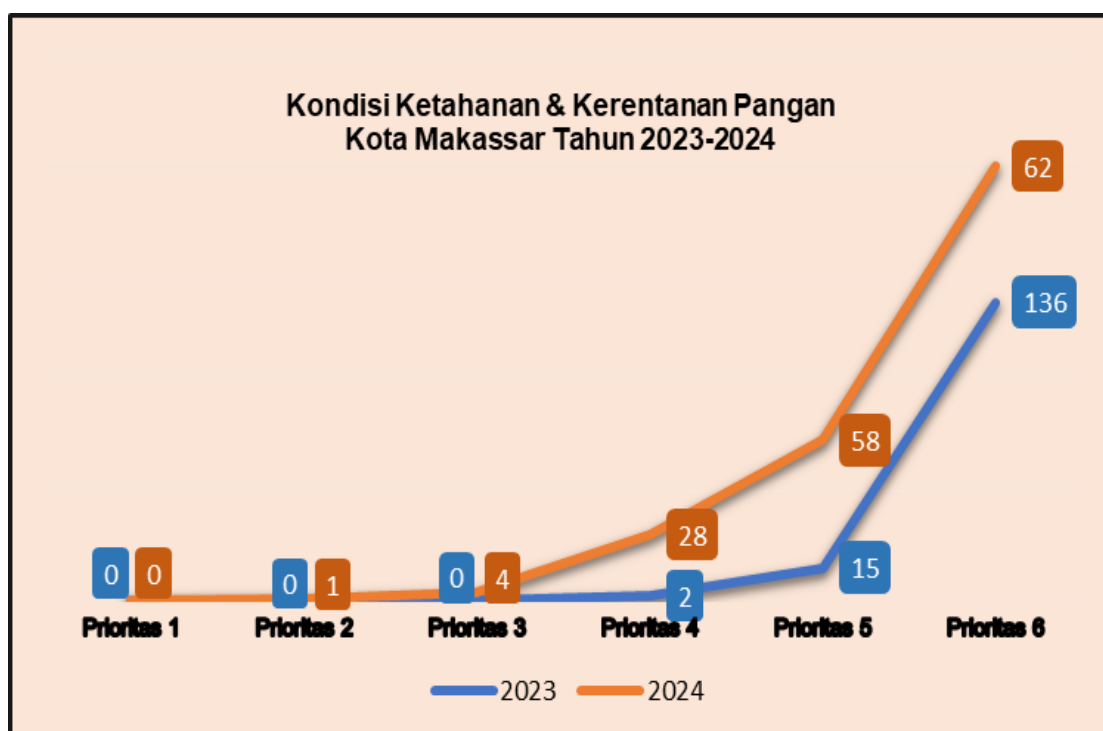


Klasifikasi Kelurahan Berdasarkan Komposit Situasi Ketahanan & Kerentanan Pangan Tahun 2024 di Kota Makassar												
Total Kelurahan	Prioritas 1		Prioritas 2		Prioritas 3		Prioritas 4		Prioritas 5		Prioritas 6	
	Kelurahan	(%)	Kelurahan	(%)	Kelurahan	(%)	Kelurahan	(%)	Kelurahan	(%)	Kelurahan	(%)
153	0	0	1	0,65	4	2,61	28	18,3	58	37,91	62	40,52
Klasifikasi	Kelurahan	(%)										
Total Prioritas 1-3	5	3,27										
Total Prioritas 4-6	148	96,73										
Total	153	100										

Lampiran 3. Situasi ketahanan dan kerentanan pangan di Kota Makassar tahun 2023-2024

No.	Nama Kecamatan	Prioritas 1		Prioritas 2		Prioritas 3		Prioritas 4		Prioritas 5		Prioritas 6		Total Kelurahan
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	MARISO	0	4	0	1	0	0	4	2	4	2	1	0	9
2	MAMAJANG	0	2	0	2	0	2	2	5	5	0	6	2	13
3	TAWALATE	0	1	0	5	0	3	1	1	8	1	2	0	11
4	RAPPOCINI	0	0	0	1	0	1	0	5	5	1	6	3	11
5	MAKASSAR	0	7	0	2	0	2	5	0	6	0	3	3	14
6	UJUNG PANDANG	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	8	5	10
7	WAJO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	6	8
8	BONTOALA	0	1	0	2	0	3	1	3	9	3	2	0	12
9	UJUNG TANAH	0	4	0	1	1	1	5	2	1	1	2	0	9
10	KEP. SANGKARRANG	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
11	TALLO	0	10	1	1	0	1	4	2	9	1	1	0	15
12	PANAKKUKANG	0	2	0	3	0	3	1	1	5	2	5	0	11
13	MANGGALA	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5	6	0	8
14	BIRINGKANAYA	0	0	0	1	1	2	0	3	2	3	8	2	11
15	TAWALANREA	0	0	0	3	0	0	0	1	2	2	6	2	8
KOTA MAKASSAR		0	32	3	22	3	20	24	31	61	25	62	23	153

Lampiran 4. Hasil peta komposit tahun 2024 yang menggambarkan gabungan dari ke-5 indikator



Lampiran 5. Hasil Uji Rapid Test Kit Keamanan dan Mutu Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar di Pasar Modern dan Tradisional Kota Makassar Tahun 2024

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
1	26 Januari 2024	HERO MARI	Apel Washington	Rapid Test:		
				Formalin	Negatif	Aman
				Pestisida	Negatif	Aman
				Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman
			Anggur Red Globe Peru	Rapid Test:		
				Formalin	Negatif	Aman
				Pestisida	Negatif	Aman
				Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman
			Semangka Merah	Rapid Test:		
				Formalin	Negatif	Aman
				Pestisida	Negatif	Aman
				Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Bayam 1 Bayam 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
				Rapid Test:		

2	26 Januari 2024	Pasar Sentral	Daun Bawang 1 Daun Bawang 2	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Sawi Hijau 1 Sawi Hijau 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Brokoli	Rapid Test: Pestisida Kadmium	Negatif Negatif	Aman Aman
			Cabe Besar 1 Cabe Besar 2	Rapid Test: Pestisida Kadmium	Negatif Negatif	Aman Aman
			Kentang 1 Kentang 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Sawi Putih 1 Sawi Putih 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
----	---------------------	---------------------------	-----------------	-------------------	-------	------------

3	13 Februari 2024	Mall PIPO	Sweet Pear	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Sunkist Navel	Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Melon	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
4	13 Februari 2024	Pasar sambung Jawa	Bunga Kol 1 Bunga Kol 2 Bunga Kol 3	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Cabe Kecil 1 Cabe Keci 2 Cabe Keci 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Daun kacang 1 Daun Kacang 2 Daun Kacang 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
				Rapid Test:		

					</	

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
----	---------------------	---------------------------	-----------------	-------------------	-------	------------

				Rapid Test:		
				Formalin	Negatif	Aman
			Semangka Kuning	Pestisida	Negatif	Aman
				Timbal	Negatif	Aman
				Rapid Test:		
			Cabe Keriting 1	Pestisida	Negatif	Aman
			Cabe Keriting 2	Timbal	Negatif	Aman
			Cabe Keriting 3	Kadmium	Negatif	Aman
			Cabe Kerting 4			
				Rapid Test:		
			Kemangi 1	Pestisida	Negatif	Aman
			Kemangi 2	Timbal	Negatif	Aman
			Kemangi 3	Kadmium	Negatif	Aman
				Rapid Test:		
6	20 Maret 2024	Pasar Pa'baeng-baeng	Kangkung 1	Pestisida	Negatif	Aman
			Kangkung 2	Timbal	Negatif	Aman
			Kangkung 3	Kadmium	Negatif	Aman
			Kangkung 4			
				Rapid Test:		
			Kol 1 Kol 2	Pestisida	Negatif	Aman
			Kol 3	Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman
				Rapid Test:		
			Mentimun 1	Pestisida	Negatif	Aman
			Mentimun 2	Timbal	Negatif	Aman
			Mentimun 3	Kadmium	Negatif	Aman
			Mentimun 4			
			Mentimun 5			
				Rapid Test:		

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Selada	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman
						Aman
			Wortel 1 Wortel 2 Wortel 3 Wortel 4	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
7	04 April 2024	Gelael	Pear Pakam Australia	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman
						Aman
			Sunkist	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman
			Semangka Merah	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman
			Bayam Merah	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
8	04 April 2024	Pasar Baru	Bayam 1 Bayam 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Bunga Kol	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Cabe Besar 1 Cabe Besar 2 Cabe Besar 3 Cabe Besar 4	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Daun Bawang 1 Daun Bawang 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Kentang 1 Kentang 2 Kentang 3 Kentang 4	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Sawi Hijau 1 Sawi Hijau 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
9	20 Mei 2024	Hypermart Panakkukang	Sawi Putih	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman
						Aman
			Apel Granny Smith	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman
			Anggur Sweet Saphira	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman
			Semangka	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman
			Tomat	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman
			Tomat Keriting	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman
						Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
10	20 Mei 2024	Pasar Toddopuli	Bunga Kol	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Cabe Kecil 1 Cabe Kecil 2 Cabe Kecil 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Daun Kacang 1 Daun Kacang 2 Daun Kacang 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Kacang Panjang 1 Kacang Panjang 2 Kacang Panjang 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Labu Siam 1 Labu Siam 2 Labu Siam 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Terong 1 Terong 2 Terong 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Cabe Keriting	Rapid Test: Pestisida	Positif	
				Timbal Kadmium	Negatif Negatif	Tidak Aman (Lanjut uji Laboratorium)
						Aman
						Aman
11	13 Juni 2024	Hero Alauddin	Pear	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	
						Aman Aman Aman
						Aman
			Jeruk Navel Jumbo	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman
						Aman
			Rock Melon	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	
						Aman Aman
						Aman
						Aman
			Kangkung 1 Kangkung 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman Aman
						Aman

12	13 Juni 2024	Pasar Parang Tambung				
			Wortel 1	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
			Wortel 2			Aman
			Wortel 3			Aman
			Wortel 4			

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
				Rapid Test:		
				Pestisida	Positif	Tidak Aman
			Cabe Keriting 1	Timbal	Negatif	(Lanjut uji Laboratorium)
			Cabe Keriting 2			Aman
			Cabe Keriting 3			
				Kadmium	Negatif	Aman
				Rapid Test:		
				Pestisida	Negatif	Aman
			Mentimun 1	Timbal	Negatif	Aman
			Mentimun 2			
				Kadmium	Negatif	Aman
				Rapid Test:		
			Kol 1	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman
			Kol 2			Aman
			Kol 3			Aman
				Rapid Test:		
				Pestisida	Negatif	Aman
			Selada 1	Timbal	Negatif	Aman
			Selada 2			
				Kadmium	Negatif	Aman

				Rapid Test:		
				Pestisida	Negatif	Aman
			Kemangi 1 Kemangi 2	Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman
				Rapid Test:		
				Formalin	Negatif	Aman
13	17 Juli 2024	Mtos	Apel Pacific Rose	Pestisida	Negatif	Aman
				Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Anggur Hijau	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman Aman
			Semangka	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman Aman
				Rapid Test:		

14	17 Juli 2024	Pasar Daya	Bayam 1 Bayam 2 Bayam 3	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Brokoli	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Cabe Besar 1 Cabe Besar 2 Cabe Besar 3 Cabe Besar 4	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Daun Bawang 1 Daun Bawang 2 Daun Bawang 3 Daun Bawang 4	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Kentang	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
				Rapid Test:		

			Sawi Hijau 1 Sawi Hijau 2	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Sawi Putih	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman Aman
15	28 Agustus 2024	Baji Pa'mai	Pear	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman Aman Aman
			Jeruk Navel Jumbo	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman Aman Aman
			Melon	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman Aman Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
				Rapid Test: Formalin Pestisida	Negatif	Aman

16	28 Agustus 2024	Pasar Pannampu	Bunga Kol 1	Timbal	Negatif	Aman
			Bunga Kol 2			Aman
			Cabe Kecil 1 Cabe Keci 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman
			Daun kacang 1 Daun Kacang 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman
			Kacang Panjang 1 Kacang Panjang 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman
			Labu Siam 1 Labu Siam 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman
			Terong 1 Terong 2 Terong 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman
17	24 September 024	Lottemart Panakkukang	Tomat 1 Tomat 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Anggur Shine	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman Aman
			Apel Fuji Rossy	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman Aman Aman
			Semangka	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman Aman Aman
18	24 September 2024	Pasar Sawah	Kangkung 1 Kangkung 2 Kangkung 3 Kangkung 4 Kangkung 5	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman
			Wortel 1 Wortel 2 Wortel 3 Wortel 4 Wortel 5	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman Aman
				Rapid Test: Pestisida		

			Cabe Keriting 1 Cabe Keriting 2 Cabe Keriting 3	Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
--	--	--	--	-------------------	-------------------------------	----------------------

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
				Rapid Test:		
			Mentimun 1 Mentimun 2 Mentimun 3	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
				Rapid Test:		
			Kol 1 Kol 2 Kol 3	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
				Rapid Test:		
			Selada 1 Selada 2 Selada 3	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
				Rapid Test:		
			Kemangi 1 Kemangi 2 Kemangi 3	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
				Rapid Test:		
				Formalin	Negatif	Aman
				Pestisida	Negatif	Aman
			Pear			

				Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman
19	03 Oktober 2024	Satu Sama Landak				
				Rapid Test:		
				Formalin	Negatif	Aman
				Pestisida	Negatif	Aman
			Sunkist			
				Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
				Rapid Test:		
				Pestisida	Negatif	Aman
			Melon	Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman
				Rapid Test:		
			Bayam 1 Bayam 2 Bayam 3 Bayam 4 Bayam 5	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
				Rapid Test:		
				Pestisida	Negatif	Aman
			Brokoli	Timbal	Negatif	Aman
				Kadmium	Negatif	Aman
				Rapid Test:		
20	03 Oktober 2024	Pasar Cendrawasih	Cabe Besar 1 Cabe Besar 2	Pestisida Timbal	Negatif Negatif	Aman Aman

			Cabe Besar 3	Kadmium	Negatif	Aman
				Rapid Test:		
			Daun Bawang 1	Pestisida Timbal	Negatif	Aman
			Daun Bawang 2	Kadmium	Negatif	Aman
			Daun Bawang 3		Negatif	Aman
			Daun Bawang 4			
				Rapid Test:		
			Kentang 1	Pestisida	Negatif	Aman
			Kentang 2	Timbal	Negatif	Aman
			Kentang 3	Kadmium	Negatif	Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Sawi Hijau 1 Sawi Hijau 2	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			Sawi Putih 1 Sawi Putih 2 Sawi Putih 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman
			AnggurShine	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman

21	20 November 2024	Farmers Market	Muscat		Negatif	Aman Aman
			Apel Dazzle NZ	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman Aman
			Semangka	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman Aman
22	20 November 2024	Pasar Terong	Bunga Kol 1	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif Negatif	
						Aman Aman
						Aman
						Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Cabe Kecil 1 Cabe Keci 2 Cabe Kecil 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	
						Aman
						Aman
						Aman
				Rapid Test:		

			Daun kacang 1	Pestisida Timbal Kadmium	Negatif	Aman
			Daun Kacang 2		Negatif	Aman
			Daun Kacang 3		Negatif	Aman
			Kacang Panjang 1	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Positif	Tidak Aman
			Kacang Panjang 2		Negatif	Aman
			Kacang Panjang 3		Negatif	Aman
			Labu Siam 1	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif	Aman
			Labu Siam 2		Negatif	Aman
			Terong 1	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif	Aman
			Terong 2		Negatif	Aman
			Tomat 1	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif	Aman
			Tomat 2		Negatif	Aman
					Negatif	Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Tomat Ceri	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif	Aman
					Negatif	Aman
					Negatif	Aman

23	10 Desember 2024	Transmart Pengayoman	Pear	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Positif	Tidak Aman (Lanjut uji Laboratorium)
					Negatif	Aman
					Negatif	Aman
			Sunkist	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Positif	Tidak Aman
						(Lanjut uji Laboratorium)
					Negatif	Aman
					Negatif	Aman
			Melon	Rapid Test: Formalin Pestisida Timbal	Positif	Tidak Aman (Lanjut uji Laboratorium)
					Negatif	Aman
					Negatif	Aman
24	10 Desember 2024	Pasar Antang	Kangkung 1 Kangkung 2 Kangkung 3 Kangkung 4 Kangkung 5	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pengambilan Sampel	Jenis Komoditas	Jenis Analisa Uji	Hasil	Keterangan
			Wortel 1 Wortel 2 Wortel 3	Rapid Test: Pestisida Timbal Kadmium	Negatif Negatif Negatif	Aman Aman Aman

1	28 Mei 2024	Pasar Toddopuli	Cabe Keriting	Pasar Terong	Carbosulfan	AOAC 2007.01	Terdeteksi	mg/kg	
					Metil Paration		Tidak Terdeteksi		
					Dichlorvos		Tidak Terdeteksi		
					Dimethoate		Tidak Terdeteksi		
					Melathion		Tidak Terdeteksi		
					Monocrotophos		Tidak Terdeteksi		
					Acephate		0,2404		
					Methamidophos		0,2871		
					Carbaryl		Tidak Terdeteksi		
					Carbofuran		Tidak Terdeteksi		
1	13 Juni 2024	Pasar Parang Tambung	Cabe Keriting	Gowa	Pestisida	AOAC 2007.01		mg/kg	
					Carbosulfan		Tidak Terdeteksi		
					Metil Paration		Tidak Terdeteksi		
					Dichlorvos		Tidak Terdeteksi		
					Dimethoate		Tidak Terdeteksi		
					Melathion		Tidak Terdeteksi		
					Monocrotophos		Tidak Terdeteksi		

					Acephate		Tidak Terdeteksi		
					Methamidophos		Tidak Terdeteksi		
					Carbaryl		Tidak Terdeteksi		
					Carbofuran		Tidak Terdeteksi		
					Pestisida				
					Acephate	18-16-5/MU/SMM-SIG (LCMS/MS)QTOF	Tidak Terdeteksi	mg/kg	
					Methamidophos	Tidak Terdeteksi	Tidak Terdeteksi		
						Tidak Terdeteksi	Tidak Terdeteksi		
					Logam Berat				
					Timbal	18-13-14/MU?SMM-SIG (ICP MS)	Tidak Terdeteksi	mg/kg	
					Kadmium		Tidak Terdeteksi	mg/kg	
					Formalin (Kuantitatif)	18-5-29/MU/SMM-SIG (HPLC-PDA)	Tidak Terdeteksi	mg/kg	
							Tidak Terdeteksi	mg/kg	
No.	Tanggal	Tempat Pengambilan	Nama Sampel	Asal Sampel	Jenis Analisis	Metode	Hasil	Satuan	Keterangan
2			Jeruk Navel	Laris Manis	Formalin (Kuantitatif)	18-5-29/MU/SM	Tidak Terdeteksi	mg/kg	
							Tidak		

						M-SIG (HPLC- PDA)	Terdeteksi	mg/kg	
3			Melon	Laris Manis					
					Formalin (Kuantatif)	18-5- 29/MU/SM M-SIG (HPLC- PDA)	Tidak Terdeteksi	mg/kg	
							Tidak Terdeteksi	mg/kg	

Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar diselenggarakan pada tahun 2024 di Kota Makassar. Adapun rincian pelaksanaan pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan kategori mikro dan kecil di Kota Makassar kegiatan sebagai berikut :

Lampiran 7. Lokasi, waktu dan tempat pelaksanaan pembinaan pelaku usaha penerima nomor Registrasi tahun 2024

No	Hari / Tanggal	Lokasi
1	Kamis, 22 Februari 2024	CV Munira Setia, Jl. Geologi No. 19 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maggala
2	Senin, 18 Maret 2024	UD Tana Doang, Jl. Drs. Aruddin Hasan No. 19, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang
3	Selasa, 2 April 2024	CV Eterna Agriculture Indonesia (Indo Rempah), Jalan Sungai Saddang Baru Nomor 44, Kelurahan Ballapparang, Kecamatan Rappocini
4	Senin, 13 Mei 2024	UD Master Food, Jalan Pannampu Nomor 30, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo
5	Rabu, 12 Juni 2024	Inti Boga Maju, Jalan Gunung Lantimojong Nomor 141, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar
6	Kamis, 4 Juli 2024	UD d'Putri Sidenreng, Jalan Rappocini Raya Nomor 31, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini
7	Jumat, 2 Agustus 2024	Ribu Rasa, Jl. Pengayoman Lr. 4 No. 5, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang
8	Senin, 9 September 2024	CV Agro Lima Satu Pangan, Jl. Dr. Ir. Sutami No. 51, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea
9	Selasa, 8 Oktober 2024	UD Hasil Harapan, Jalan Barukang Raya Nomor 27, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo
10	Selasa, 12 November 2024	CV Zahirah Sukses Bersama, Jl. Kapasa Baru No 8, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo
11	Jumat, 6 Desember 2024	PT Utama SMS Group, Ruko Pettarani Bussines Center Blok B11, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini

Lampiran 8. Penerbitan Nomor Registrasi PDUK Kota Makassar Tahun 2024

No	Nama Unit Usaha	Alamat Unit Penanganan	Nama PSAT	Kemasan dan Berat Bersih	Nama Dagang/Merk	Nomor Registrasi
1	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Kemiri	Plastik, 100 gram, 250 gram	Tana Doang Kemiri	PDUK 737107010010324
2	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Kacang Merah	Plastik, 200 gram	Kacang Merah Tana Doang	PDUK 737102010020324
3	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	kacang hijau	Plastik, 200 gram	Kacang Hijau Tana Doang	PDUK 737102010030324
4	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Ketumbar	Plastik, 40 gram	Ketumbar Tana Doang	PDUK 737107010040324

5	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Merica	Plastik, 30 gram	Merica Tana Doang	PDUK 737107010050324
6	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Biji Pala	Plastik, 40 gram	Biji Pala Tana Doang	PDUK 737107010060324
7	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Kayu manis	Plastik, 40 gram	Kayu Manis Tana Doang	PDUK 737106010070324
8	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Kacang tanah	Plastik, 200 gram	Kacang Tanah Tana Doang	PDUK 737102010080324
9	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Kacang mete	Plastik, 100 gram, 250 gram	Kacang Mente Tana Doang	PDUK 737104010090324

10	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Cengkeh	Plastik, 40 gram	Cengkeh Tana Doang	PDUK 737107010100324
11	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Kenari	Plastik, 100 gram, 250 gram, 500 gram	Kenari Tana Doang	PDUK 737107010110324
12	Tana Doang	Jl Drs Aruddin Hasan No 19 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang	Kunyit bubuk	Plastik, 30 gram	Kunyit Tana Doang	PDUK 737106010120324
No	Nama Unit Usaha	Alamat Unit Penanganan	Nama PSAT	Kemasan dan Berat Bersih	Nama Dagang/Merk	Nomor Registrasi
13	CV Agro Lima Satu Pangan	Jl Prof. Dr. Ir. Sutami No. 51 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea	Beras Premium	Plastik, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 40 Kg, dan 50 Kg	Mambruk	PDUK 737101010130424
14	Pasar Lorong Indonesia	Jl Maccini baru no 77 kel maccini gusung kec makassar	Bawang merah	Plastik dan polynet 100 gr, 350 gr, 500gr	Pasar lorong indonesia bawang merah	PDUK 737105010140524

15	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Lada Hitam Bubuk	Plastik 50 gr	MS Bubuk Lada Hitam	PDUK 737107010150624
16	CV Zahirah Sukses Bersama	Jl. Kapasa Baru No. 8 Kel. Kapasa, Kecamatan tamalanrea	Beras Medium sosoh	Karung Plastik, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg	Cap Sijago	PDUK 737101010160624
17	CV Agro Lima Satu Pangan	Jl Prof. Dr. Ir. Sutami No. 51 Kelurahan	Beras Premium	Plastik, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 40 Kg, dan 50 Kg	Dua M Senang	PDUK 737101010170624
18	CV Agro Lima Satu Pangan	Jl Prof. Dr. Ir. Sutami No. 51 Kelurahan	Beras Medium	Plastik, 5 Kg, 9 Kg, 10 Kg, 23 Kg, 24 Kg, 25 Kg, 40 kg, dan 50 Kg	Mata 7	PDUK 737101010180624
19	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Bubuk Kunyit	100 gr	MS Bubuk Kunyit	PDUK 737106010190724
20	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Lada Hitam	50 gr	MS Lada Hitam Bulat	PDUK 737107010200724
21	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Kayu manis bubuk	100 gr	MS Bubuk kayu manis	PDUK 737107010210724
22	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Adas pedas bubuk	50 gr	MS Bubuk Adas Pedas	PDUK 737107010220724

No	Nama Unit Usaha	Alamat Unit Penanganan	Nama PSAT	Kemasan dan Berat Bersih	Nama Dagang/Merk	Nomor Registrasi
23	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Cabai Merah bubuk	100 gr	MS Bubuk Cabe	PDUK 737105010230724
24	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Adas manis bubuk	50 gr	MS Bubuk Adas Manis	PDUK 737107010240724
25	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Adas manis	50 gr	MS Adas Manis	PDUK 737107010250724
26	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Lada putih bubuk	50 gr	MS Bubuk Lada Putih	PDUK 737107010260724
27	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Cengkeh Bubuk	50 gr	MS Bubuk Cengkeh	PDUK 737107010270724
28	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Pekak bubuk	50 gr	MS Bubuk Pekka	PDUK 737106010280724
29	CV Zahirah Sukses Bersama	Jl. Kapasa Baru No. 8 Kel. Kapasa, Kecamatan tamalanrea	beras premium	5 kg, 10 kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg	Cap Sijago	PDUK 737101010290724
30	CV Agro Lima Satu Pangan	Jl Prof. Dr. Ir. Sutami No. 51 Kelurahan	beras medium	3 kg, 5 kg, 10 kg, 16 kg, 20	Mata 7	PDUK 737101010300724

		Bira, Kecamatan Tamalanrea		kg, 25 kg		
31	CV Zahirah Sukses Bersama	Jl. Kapasa Baru No. 8 Kel. Kapasa, Kecamatan tamalanrea	beras premium	5 kg, 10 kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg	CMB	PDUK 7371010103108 24
32	CV Zahirah Sukses Bersama	Jl. Kapasa Baru No. 8 Kel. Kapasa, Kecamatan tamalanrea	beras medium	5 kg, 10 kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg	CMB	PDUK 7371010103208 24
33	CV Munira Setia	Jl. Geologi No. 19 Kel Bangkala, Kec. Manggala	Asam jawa	200 gram	MS	PDUK 73710701033112 4



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Lt. 6 Telepon (0411) 3616-639
M A K A S S A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 050/ /DKP/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, perlu disusun suatu system pelaporan akuntabilitas kinerja organisasi yang menggambarkan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi setiap tahun;

b. bahwa Pegawai yang tercantum dalam lampiran Kputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;

12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR 2024

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan arahan, masukan, baik keijakan maupun substansi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024;
2. Melaporkan hasil perkembangan atau pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja per triwulan dan Evaluasi Internal Perbidang baik Triwulanan maupun Tahunan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 12 Februari 2024,

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19820930 200012 1 002

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan Kota
Makassar

Tanggal : 12 Februari 2024

PENUNJUKAN TIM
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1.	Pembina	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
2.	Ketua	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Tim Penyusun	a. Kepala Bidang Keamanan Pangan b. Kepala Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan c. Kepala Bidang Kerawanan, Distribusi dan Cadangan Pangan d. Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan e. Unsur Staf


Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19820930 200012 1 002

**MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TAHUN				
				Capaian Program					
				Tolok Ukur	2022	2023	2024	2025	2026
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					19,738,883,07	20,986,934,35	22,055,442,62	23,278,650,36	24,525,144,82
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,965,554,62	7,965,554,62	7,965,554,62	7,965,554,62	7,965,554,62
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			320,621,00	320,621,00	320,621,00	320,621,00	320,621,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	159,520,00 0	159,520,00 0	159,520,00 0	159,520,00 0	159,520,00 0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9,984,00 0	9,984,00 0	9,984,00 0	9,984,00 0	9,984,00 0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9,161,00 0	9,161,00 0	9,161,00 0	9,161,00 0	9,161,00 0
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9,595,00 0	9,595,00 0	9,595,00 0	9,595,00 0	9,595,00 0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9,005,00 0	9,005,00 0	9,005,00 0	9,005,00 0	9,005,00 0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	101,215,00 0	101,215,00 0	101,215,00 0	101,215,00 0	101,215,00 0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	22,141,00 0	22,141,00 0	22,141,00 0	22,141,00 0	22,141,00 0
		Administrasi Keuangan Perangkat			6,138,280,00	6,138,280,00	6,138,280,00	6,138,280,00	6,138,280,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	5,764,049,00 0	5,764,049,00 0	5,764,049,00 0	5,764,049,00 0	5,764,049,00 0
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	168,000,00 0	168,000,00 0	168,000,00 0	168,000,00 0	168,000,00 0
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	134,640,00 0	134,640,00 0	134,640,00 0	134,640,00 0	134,640,00 0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	17,504,00 0	17,504,00 0	17,504,00 0	17,504,00 0	17,504,00 0

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TAHUN				
				Capaian Program					
				Tolok Ukur	2022	2023	2024	2025	2026
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	18,329,00 0	18,329,00 0	18,329,00 0	18,329,00 0	18,329,00 0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	23,729,00 0	23,729,00 0	23,729,00 0	23,729,00 0	23,729,00 0
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	12,029,00 0	12,029,00 0	12,029,00 0	12,029,00 0	12,029,00 0
		Administrasi Umum Perangkat	Kota Makassar		389,393,82	389,393,82	389,393,82	389,393,82	389,393,82
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	59,993,82 5	59,993,82 5	59,993,82 5	59,993,82 5	59,993,82 5
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	10,000,00 0	10,000,00 0	10,000,00 0	10,000,00 0	10,000,00 0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	13,940,00 0	13,940,00 0	13,940,00 0	13,940,00 0	13,940,00 0
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	7,860,00 0	7,860,00 0	7,860,00 0	7,860,00 0	7,860,00 0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	173,000,00 0	173,000,00 0	173,000,00 0	173,000,00 0	173,000,00 0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	21,600,00 0	21,600,00 0	21,600,00 0	21,600,00 0	21,600,00 0
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	103,000,00 0	103,000,00 0	103,000,00 0	103,000,00 0	103,000,00 0
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			137,999,00	137,999,00	137,999,00	137,999,00	137,999,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	137,999,00 0	137,999,00 0	137,999,00 0	137,999,00 0	137,999,00 0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			276,104,80	276,104,80	276,104,80	276,104,80	276,104,80
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	219,389,80 0	219,389,80 0	219,389,80 0	219,389,80 0	219,389,80 0
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	31,500,00 0	31,500,00 0	31,500,00 0	31,500,00 0	31,500,00 0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	12,000,00 0	12,000,00 0	12,000,00 0	12,000,00 0	12,000,00 0

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026 67

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TAHUN				
				Capaian Program					
				Tolok Ukur	2022	2023	2024	2025	2026
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	13,215,00 0	13,215,00 0	13,215,00 0	13,215,00 0	13,215,00 0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			287,656,00	287,656,00	287,656,00	287,656,00	287,656,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	89,284,00 0	89,284,00 0	89,284,00 0	89,284,00 0	89,284,00 0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	187,392,00 0	187,392,00 0	187,392,00 0	187,392,00 0	187,392,00 0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	10,980,00 0	10,980,00 0	10,980,00 0	10,980,00 0	10,980,00 0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			415,500,00	415,500,00	415,500,00	415,500,00	415,500,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	324,000,00 0	324,000,00 0	324,000,00 0	324,000,00 0	324,000,00 0
Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			193,070,00 0	195,570,00 0	200,570,00 0	205,570,00 0	205,570,00 0
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Penanganan Daerah			193,070,00 0	195,570,00 0	200,570,00 0	205,570,00 0	205,570,00 0
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Makassar	Ketersediaan Pangan Utama	193,070,00 0	195,570,00 0	200,570,00 0	205,570,00 0	205,570,00 0
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			10,737,507,15 0	11,670,412,92 5	12,645,985,39 8	13,700,855,63 7	14,859,589,10 0
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah			483,420,00 0	545,912,20 0	574,119,00 0	587,387,00 0	600,858,00 0
		Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Makassar	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata, Skor Pola Pangan Harapan	327,593,00 0	341,759,20 0	364,067,00 0	352,800,00 0	365,271,00 0
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Makassar	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata, Skor Pola Pangan Harapan	155,827,00 0	204,153,00 0	210,052,00 0	234,587,00 0	235,587,00 0

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TAHUN				
				Capaian Program					
				Tolok Ukur	2022	2023	2024	2025	2026
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			75,000,00	80,000,00	85,000,00	90,000,00	95,000,00
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata, Skor Pola Pangan Harapan	75,000,00 0	80,000,00 0	85,000,00 0	90,000,00 0	95,000,00 0
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan			10,179,087,16 0	11,044,600,72 5	11,986,866,39 8	13,023,468,63 7	14,163,731,10 0
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	103,504,00 0	104,523,40 0	105,644,74 0	106,878,21 4	108,235,03 5
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Makassar	Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata Jumlah Skill Training Gratis Skor Pola Pangan Harapan	9,930,538,40 0	10,792,522,90 0	11,731,141,79 0	12,763,622,56 9	13,899,351,42 5
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata, Skor Pola Pangan Harapan	145,044,75 0	147,454,42 5	150,079,86 8	152,967,85 4	156,144,64 0
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			314,409,60	350,156,60	382,426,40	414,532,40	448,530,40
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			197,205,60	217,205,60	232,164,40	252,482,40	281,582,40
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta	Kota Makassar	Persentase Penanganan Daerah Rawan	197,205,60 0	217,205,60 0	232,164,40 0	252,482,40 0	281,582,40 0
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			117,204,00	132,950,00	150,262,00	162,050,00	166,948,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan	Kota Makassar	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	69,081,00 0	70,427,00 0	80,224,00 0	88,413,00 0	90,813,00 0
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup	Kota Makassar	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	48,123,00 0	62,523,00 0	70,038,00 0	73,637,00 0	76,135,00 0

Tujuan	Sasaran	Uraian/ Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Capaian Program Tolok Ukur	TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			528,341,70	805,241,20	866,906,20	992,137,70	1,045,960,70
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			528,341,70	805,241,20	866,906,20	992,137,70	1,045,960,70
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	93,541,20 0	129,541,20 0	130,801,20 0	151,801,20 0	179,501,20 0
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal	Kota Makassar	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	237,366,00 0	256,725,00 0	287,889,00 0	304,959,00 0	308,959,00 0
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal	Kota Makassar	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	42,539,00 0	249,385,00 0	263,905,00 0	341,605,00 0	362,005,00 0
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Kota Makassar	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	154,895,50 0	169,590,00 0	178,311,00 0	193,772,50 0	195,435,50 0

Makassar, 10 November 2021
 Plt. Kepala Dinas Ketahanan
 Pangan Kota Makassar

FERDI S.Pt, M.Sc, Ph.D
 Pangkat : Pembina Utama, IV/a
 NIP : 1971216 200212 1 003





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 316639
MAKASSAR



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070/ 582 /DKP/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022-2026**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjajilan Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022-2026;
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Makassar,

Pada tanggal 7 Januari 2022


KEPALA DINAS,
MUHAMMAD RHEZA, S-STP, M.Si
 Pangkat : Pembina - IV.a
 NIP. 19800314 199912 1 002



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jl. Jendral Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 316639
MAKASSAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022-2026

KABUPATEN/KOTA : MAKASSAR
TAHUN : 2022-2026
SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

"Terwujudnya rumah tangga tahan pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman berbasis lorong"

- MISI :
1. Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka pelayanan penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, yang berbasis sumber daya lokal.
 2. Menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi pangan di sektor lorong-lorong melalui penguatan UKM pangan.
 3. Melakukan pengawasan dan koordinasi pengendalian dan pengelolaan ketersediaan pangan di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
 4. Meningkatkan Kapasitas kelompok Tani lorong beserta kelompok wanita tani dan sarana prasarana pendukung.
 5. Meningkatkan partisipasi kaum perempuan sebagai penyedia utama pangan dalam rumah tangga melalui kelompok wanita tani berbasis lorong dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan.

Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Kegiatan, penyusunan, pedoman, petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, koordinasi bidang ketersediaan dan produksi pangan, kerawanan, distribusi dan cadangan pangan, keamanan pangan serta konsumsi dan penganeekaragaman pangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman	Angka Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tersedianya data lokasi Analisa Ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan.	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Laporan Kegiatan	Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Nilai capaian peningkatan = $\% \text{ AKG (Angka Kecukupan Gizi)} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan} \times \% \text{ AKG} = \text{Energi masing-masing komoditas} \times 100 / \text{Angka Kecukupan Gizi}$.
		Angka Ketersediaan Energi Perkapita		Tersedianya data komoditi harga pangan	Bidang Ketersediaan & produksi pangan,	Laporan NBM	Jumlah produksi - (stok akhir - stok awal) + import - ekspor-ketersediaan energi = ketersediaan pangan/kapita/hari : $100 \times \text{kandungan kalori} \times \text{bagian yang dapat dimakan (BDD)}$.
		Angka Ketersediaan Protein Perkapita		Tersedianya cadangan pangan yang teridentifikasi			

		Jumlah Lorong Wisata		Tersedianya lorong wisata	Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan	Laporan Kegiatan	
		Jumlah Peserta Skill Training		Terlatihnya Peserta Skill Training yang bersertifikasi		Laporan Kegiatan	Program prioritas pemerintah Kota Makassar
		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tersedianya laporan untuk wilayah yang teridentifikasi yang mengalami Ketahanan dan Kerawanan pangan.	Bidang Kerawanan, distribusi & cadangan pangan.	Laporan Kegiatan : - PETA KERAWANAN PANGAN - DATA SKPG	Jumlah Wilayah rawan pangan yang dibina dibandingkan Wilayah Rawan pangan X 100
		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tersedianya laporan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Bidang Keamanan Pangan	Laporan Kegiatan	Jumlah temuan adalah Kasus sampel pangan yang ditemukan yang melanggar standar Keamanan Pangan
2	Meningkatkan Akuntabilitas , Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Sekretariat	Laporan Kegiatan	Jumlah sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik / jumlah sarana dan prasarana X 90
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah		Tersedianya dokumen laporan keuangan dan laporan perangkat daerah			
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik			

Makassar, 02 Januari 2023


KEPALA DINAS
MUHAMMAD RHEZA, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina - IV.a
 NIP. 19800314 199912 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA MAKASSAR
2024**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALAMSYAH SAHABUDDIN ,S.STP, M.Si
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI ARWIN AZIZ**
Jabatan : Pjs. WALIKOTA MAKASSAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANDI ARWIN AZIZ

Makassar, 27 September 2024

Pihak Pertama,

Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN ,S.STP., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan di masyarakat dengan menjaga Ketersediaan Pangan dan Meningkatkan Konsumsi Pangan yang bergizi seimbang dan aman	Ketersediaan Pangan Utama	92 %
		Skor Pola Pangan Harapan	88 Poin
		Ketersediaan Energi Perkapita Perkapita	2700 Kkal/Kapita/Tahun
		Ketersediaan Protein perkapita	127 gr/Kapita/Tahun
		Jumlah Lorong Wisata	300 Lorong
		Jumlah Training Skill	-
		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	11,76 %
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	94%
2	Meningkatkan akuntabilitas, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	90%

Program	Anggaran Perubahan	Keterangan
1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 7,611,265,700	APBD DKP
2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 354,833,000	APBD DKP
3 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 437,826,700	APBD DKP
4 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 48,000,000	APBD DKP
5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,438,787,270	APBD DKP

Jumlah Rp 15,890,712,670

Makassar, 27 September 2024

Pjs. Walikota Makassar,

PLT. KEPALA DINAS

ANDI ARWIN AZIZ

Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAODE LILI SUMARNI, S.IP.,M.Si**
 Jabatan : **KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP, M.Si**
 Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

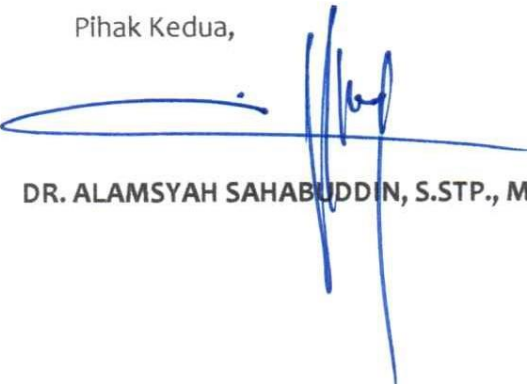
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 27 September 2024

Pihak Kedua,


DR. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

Pihak Pertama,


WAODE LILI SUMARNI, S.IP.,M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	94%
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman dan bermutu	1 Laporan
1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen
2	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Jumlah Dokumen Nomor Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	1 Dokumen 1 Dokumen
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen

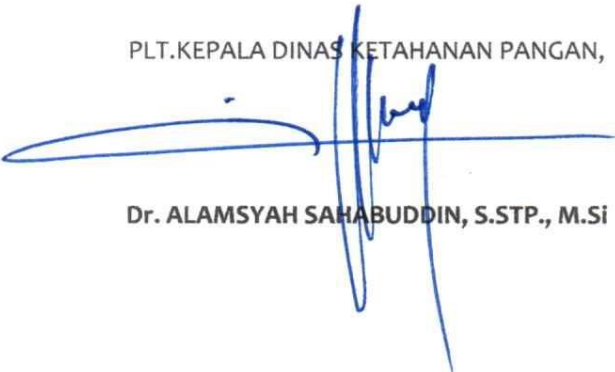
Program**Anggaran Perubahan**

I	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 437,826,700
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 437,826,700
1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 122,673,500
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 282,074,300
3	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp 33,078,900

Makassar, 27 September 2024

PLT.KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN,


Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

WAODE LILI SUMARNI, S.IP.,M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAISAL, S.Pt., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN., S.STP., M.Si**
Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

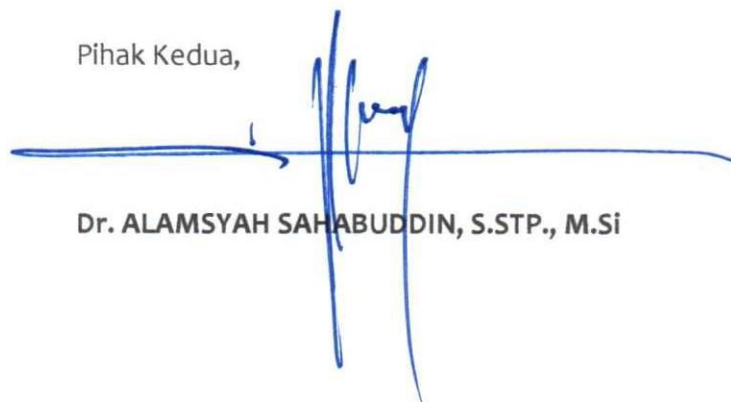
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

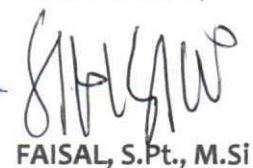
Makassar, 27 September 2024

Pihak Kedua,



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

Pihak Pertama,



FAISAL, S.Pt., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Lorong Wisata	300 Lorong
		Jumlah Training Skill Gratis	-
		Ketersediaan Energi	2700 kkal/kap/tahun
		Ketersediaan Protein	127 kkal/kap/tahun
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	88 Poin
1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Lokasi Analisa Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	1 Kota Makassar
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun	1 Dokumen
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	23 Laporan
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	6 Laporan

Program**Anggaran Perubahan**

1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 6,831,047,400
1 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 6,831,047,400
1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Rp 54,300,000
1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 6,429,797,400
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Rp 346,950,000

Makassar, 27 September 2024

PLT.KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN,

FAISAL, S.Pt., M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMANIAR SYAMSUL, SP, M.Si**
 Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN PRODUKSI PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si**
 Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

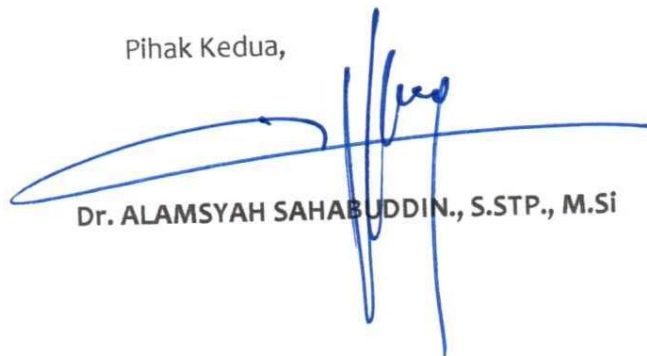
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

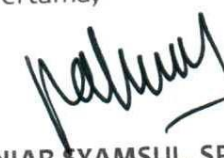
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 27 September 2024

Pihak Kedua,


Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

Pihak Pertama,


RAHMANIAR SYAMSUL, SP., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO (1)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
I	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	300 Lorong
		Jumlah Training Skill Gratis	-
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	88 Poin
		Ketersediaan Energi Perkapita	2700 Kkal/Kapita/Tahun
		Ketersediaan Protein Perkapita	127 gr/kapita/Tahun
I	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Ketersediaan Energi dan Protein serta Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	16 Laporan
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan	15 Kecamatan
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan	15 Kecamatan
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Anggaran

I	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 633,217,500
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 581,217,500
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp 581,217,500
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Rp 171,634,900
2	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Rp 189,477,200
3		Rp 220,105,400

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
II Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan

Rp 52,000,000

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh

1 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Rp 52,000,000

1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian
Pangan Lainnya

Rp 52,000,000

Makassar, 27 September 2024

PLT.KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN
DAN PRODUKSI PANGAN,



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si



RAHMANIAR SYAMSUL, SP., M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI SHINTA PRATIWI, S.STP., M.AP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERAWANAN, DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN., S.STP, M.Si**
Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

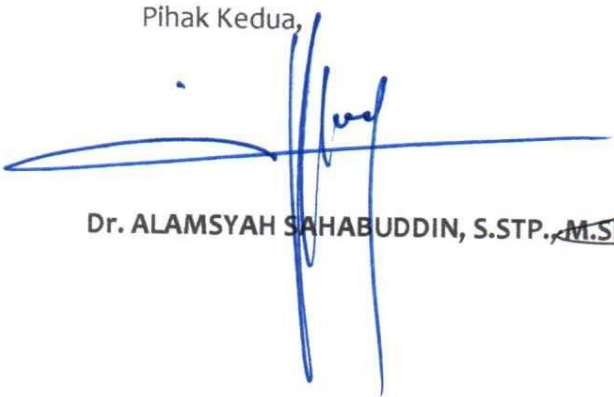
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Makassar, 27 September 2024

Pihak Pertama,


Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si


ANDI SHINTA PRATIWI, S.STP., M.AP

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tersedianya Laporan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 Dokumen
I	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi tentang daerah yang rentan terhadap Kerawanan Pangan	1 Laporan
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di mutakhirkan	1 Dokumen
II	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi mengenai analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	1 Laporan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Gizi Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2 Laporan
2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
III	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah	20 Ton
I	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	20 Ton

Program

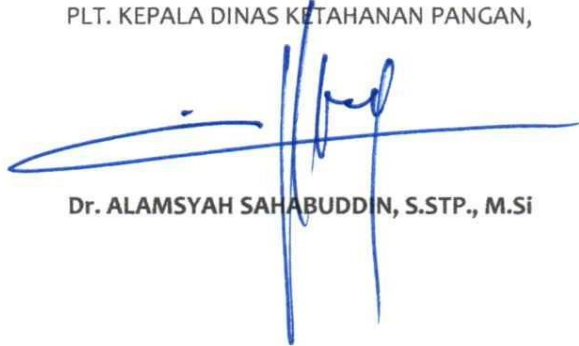
Anggaran Perubahan

I	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 679,233,800
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 138,699,000
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp138,699,000
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 216,134,000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 156,766,400

2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 59,367,600
II	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 324,400,800
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 324,400,800

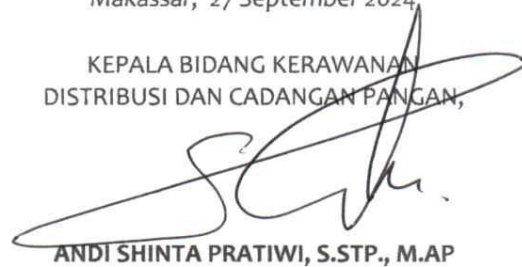
Makassar, 27 September 2024

PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

KEPALA BIDANG KERAWANAN
DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN,



ANDI SHINTA PRATIWI, S.STP., M.AP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. IRMADWIANTI, S.TP, M.Si**
 Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
 DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si**
 Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

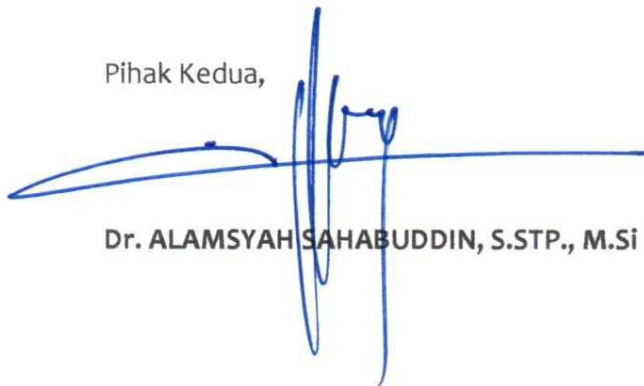
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

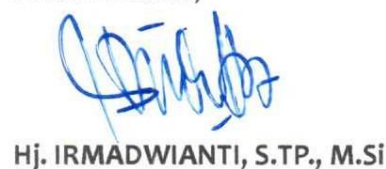
Makassar, 27 September 2024

Pihak Kedua,



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

Pihak Pertama,



Hj. IRMADWIANTI, S.TP, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas	90%
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	90%
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	90%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	14 Dokumen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan

No	Program	Anggaran Perubahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	163,788,500
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	163,788,500
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	102,273,500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	10,209,900
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	9,954,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	8,795,500
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp	10,155,500
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Rp	22,400,100

PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

Makassar, 27 September 2024

KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Hj. IRMADWIANTI, S.TP., M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DARMAWATY, SP., MP**
Jabatan : **KEPALA SUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si**
Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

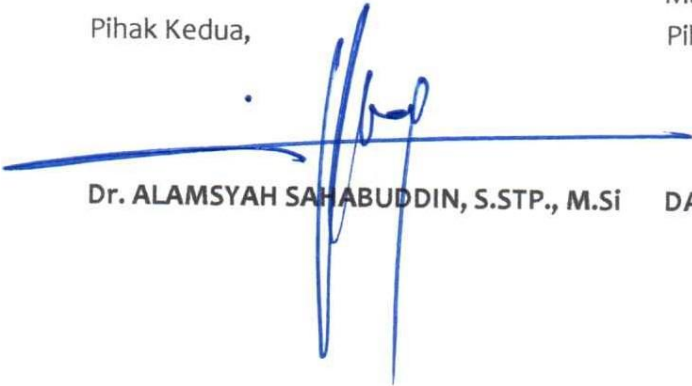
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Makassar, 27 September 2024

Pihak Pertama,


Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si


DARMAWATY, SP.,MP

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN**

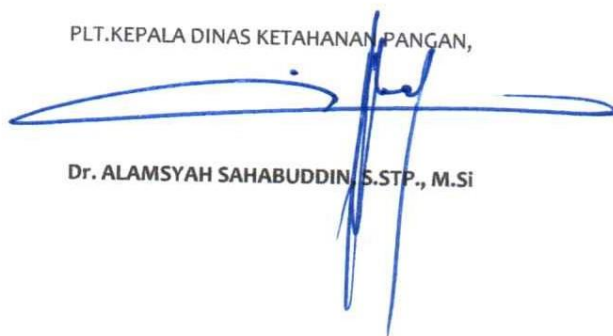
NO. (1)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas	90%
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	90%
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	90%
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit

No	Program	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,566,720,800
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 519,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 519,000,000
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 793,259,500
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 149,474,100
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 84,663,000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5,867,400
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 266,000,000
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 287,255,000
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 389,052,900
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 58,200,000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 330,852,900
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 164,096,000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 31,916,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 74,990,000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 57,190,000

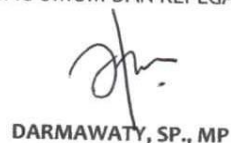
Makassar, 27 September 2024

PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP., M.Si

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



DARMAWATY, SP., MP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. IRMADWIANTI, S.TP., M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP, M.Si**

Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 27 September 2024

Pihak Kedua,



DR. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP, M.Si

Pihak Pertama,



Hj. IRMADWIANTI, S.TP., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO. (1)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas	90%
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	90%
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	90%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	1 Dokumen
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disiapkan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen

No	Program	Anggaran Perubahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5,409,590,370
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5,409,590,370
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	4,935,059,970.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	268,080,000.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		
3	Keuangan SKPD	Rp	188,645,700.00
4	Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	8,878,000.00
5	Penyusunan Pelporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	8,926,700.00

Makassar, 27 September 2024

PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,



DR. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP, M.Si

PLT. KASUBAG KEUANGAN



Hj. IRMADWIANTI, S.TP., M.Si